

**PANDANGAN IBN KHALDUN TENTANG KEKUASAAN DAN ETIKA  
POLITIK DALAM KITAB MUKADDIMAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)

Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)



**Disusun Oleh:  
Fahmi Husein  
NIM. A92215082**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fahmi Husein  
NIM : A92215082  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 8 Februari 2021

Saya yang menyatakan



Fahmi Husein

A92215082

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Fahmi Husein (A92215082) dengan judul **“Pandangan Ibn Khaldun Tentang Kekuasaan dan Etika Politik Dalam Kitab *Mukaddimah*”** ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 15 Januari 2021 di Surabaya.

Oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wasid', written in a cursive style.

Dr. Wasid, SS., M.Fil.I

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi a.n Fahmi Husein (A92215082) telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan

LULUS Pada tanggal 18 Februari 2021

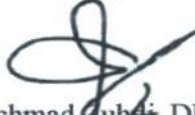
Ketua/Penguji I



Dr. Wasid, SS., M.Fil. I

NIP.2005196

Penguji II



Dr. H. Achmad, DH, M.Fil.I

NIP. 196110111991031001

Penguji III



Dr. Imam Ibnu Hajar, S.Ag, M.Ag

NIP. 196808062000031003

Penguji IV



Dwi Susanto, M.A

NIP. 197712212005011003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Agus Aditoni, M. Ag



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahmi Husein  
 NIM : A92215082  
 Fakultas/Jurusan : Adab Dan Humaniora/Sejarah Peradaban Islam  
 E-mail address : [Fahmihusein74@gmail.com](mailto:Fahmihusein74@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pandangan Ibn Khaldun Tentang Kekuasaan Dan Etika Politik Dalam Kitab Mukaddimah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2022

Penulis

( Fahmi Husein )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi yang ditulis dengan judul “Pandangan Ibn Khaldun Tentang Kekuasaan dan Etika Politik Dalam Kitab *Muqaddimah*” ini berfokus pada permasalahan 1. Bagaimana sejarah seorang tokoh Sejarahwan Ibn Khaldun hidup dan perkembangan pemikirannya. 2. Bagaimana pandangan politik Ibn Khaldun terkait Kekuasaan dan Etika Politik.

Skripsi ini merupakan kajian literasi yang diteliti oleh penulis menggunakan pendekatan sosio-historis. Ditulis dengan menggunakan teori Hermeneutika dari Wilhelm Dilthey. Menurut penulis kekuasaan dan etika politik yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun menjadi satu solusi dalam rangka menjalankan suatu negara ataupun dalam urusan sosial politik kemasyarakatan. Melihat kondisi Politik nasional maupun global dalam perihal kekuasaan sering terjadi satu gerak yang negatif dengan melakukan penindasan dan lalim. Dalam pandangan Ibn Khaldun kekuasaan haruslah dijalankan dengan pertimbangan sisi nilai-nilai moral etik, untuk mencapai kehidupan dan tatanan yang baik.

Setelah melakukan penelitian terhadap sumber-sumber literatur yang ada, Penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan diatas. Pertama, Ibn Khaldun adalah seorang tokoh yang dilahirkan dari kalangan keluarga yang terhormat, kehidupannya yang selalu diliputi dengan urusan ilmu pengetahuan dan belajar, menjadikannya seorang yang cerdas dan berilmu, kemudian yang menjadikannya seorang pemikir sekaligus aktor politik adalah bagian hasil pengendapannya pada apa ia jalani ketika menjadi seorang sekretaris negara. Kedua, dalam pandangan Ibn Khaldun kekuasaan adalah bagian dari fitrah manusia untuk bisa saling menguasai, dengan hal ini kekuasaan haruslah diciptakan demi terwujudnya suatu keamanan, kesejahteraan dan memberi perlindungan. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan moral etik melalui semangat kesolidaritasan yang tinggi, membentuk sistem negara yang egaliter, dan memilih pemimpin yang mampu untuk *'Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Kata kunci: Ibn Khaldun, Kekuasaan, Etika Politik, *Muqaddimah*, Ashabiyyah

## ABSTRACT

The thesis, which is written with the title “Pandangan Ibn Khaldun Tentang Kekuasaan dan Etika Politik Dalam Kitab *Muqaddimah*” focuses on the problems 1. How the history of a historian Ibn Khaldun's life and the development of his thoughts. 2. How about Ibn Khaldun's political views regarding Political Power and Ethics.

This thesis is a literacy study which is examined by the author using a socio-historical approach. Written using the Hermeneutic theory of Wilhelm Dilthey. According to the author, the political power and ethics offered by Ibn Khaldun is a solution in the context of running a country or in social politic affairs. Seeing the conditions of national and global politics in power, there is often a negative move by oppressing and tyrannizing. On the Ibn Khaldun's view, power must be exercised with the consideration of ethical moral values in order to achieve a life and good order.

After conducting research on existing literature sources, the author can conclude from the problems above. First, Ibn Khaldun is a figure born from a respectable family, his life is always covered with matters of science and learning, making him an intelligent and knowledgeable person, then what makes him a thinker as well as a political actor is part of his deposition on what he lived when become a secretary of state. Second, on the Ibn Khaldun's view, power is part of human nature to be able to control each other, in this case power must be created for the sake of security, welfare and protection. This is done by promoting ethical morals through a high spirit of solidarity, forming an egalitarian state system, and selecting capable leaders to 'Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

*Keyword: Ibn Khaldun, Power, Polithical Ethics, Muqaddimah, Ashabiyah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	14



## **BAB II : DESKRIPSI KEKUASAAN DAN ETIKA POLITIK**

A. Kekuasaan .....	16
1. Definisi Kekuasaan .....	18
2. Mempertahankan Kekuasaan.....	21
B. Etika Politik .....	22
1. Definisi Etika Politik.....	26
2. Kebutuhan Akan Etika dalam Politik dan Sebuah Negara .....	29
3. Hubungan Antara Kekuasaan Dan Etika Politik .....	31

## **BAB III : SEJARAH DAN PERKEMBANGAN INTELEKTUAL IBN KHALDUN**

A. Keluarga Besar Dan Masa Kecil Ibn Khaldun .....	35
B. Masa Pendidikan Ibn Khaldun. ....	38
C. Guru-Guru Ibn Khaldun.....	40
D. Corak Pemikiran dan Aktivitas Politik Ibn Khaldun.....	43
E. Karya-Karya Ibn Khaldun.....	48

## **BAB IV : KEKUASAAN DAN ETIKA POLITIK MENURUT IBN KHALDUN**

A. Pemikiran Ibn Khaldun tentang Kekuasaan .....	50
1. Intepretasi Kekuasaan Politik Ibn Khaldun.....	50
2. Implementasi Kekuasaan Dalam Politik .....	56
B. Pemikiran Ibn Khaldun tentang Etika Politik .....	61

1. <i>'Ashabiyah</i> .....	62
2. Sistem dan Bentuk Negara .....	64
3. Pemimpin dan Kedudukannya.....	65

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Abdurrahman Ibnu Khaldun Al Maghribi Al Hadrami Al Maliki atau yang lebih dikenal dengan Ibn Khaldun merupakan sejarawan dan maestro sosiologi Islam yang mempunyai kemampuan mengingat isi Al-Qur'an sejak usia belia. Khaldun lahir di Tunisia tujuh abad silam, tepatnya bulan Mei tanggal 27 di tahun 1332M. Dan beliau meninggal di Kairo pada usia 74 tahun.

Beliau sering disebut sebagai ahli politik Islam, dan *Father Islamic Economy*, hal ini dikarenakan sudut pandang mengenai teori ekonomi yang Ibn Khaldun kemukakan lebih mudah dipahami dan masuk akal. Teori Ibn Khaldun sudah ada lebih dahulu jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori ekonominya pada awal abad 18 hingga awal abad 19. Lebih jauh dari itu, berbekal ketekunan dalam menulis sejak remaja, buah pemikiran yang Abdurrahman tuangkan dalam tulisan-tulisannya beredar luas dan banyak digemari khalayak.<sup>1</sup>

Sumber pemikiran Ibn Khaldun yang tertuang dalam setiap karya tulisnya adalah hasil dari pembelajaran dan pemahamannya terhadap ilmu yang begitu mendalam. Berbekal dari hasil belajar dan pemahamannya yang luas, Ibn Khaldun

---

<sup>1</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, alih bahasa Masturi Irham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar:2017), 1079.

mempunyai kemampuan untuk melihat dan menganalisa kehidupan masyarakat disekeliling tempat tinggalnya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan kehidupan masyarakat Ibn Khaldun yang gemar mengembara mencari ilmu. Kitab *Muqaddimah* menjadi salah satu karya Tulis Ibnu khaldun yang berisi sejarah. Akan tetapi, teori - teori politik yang ada dalam kitab ini sangat mudah untuk ditemukan. Menurut penulis, alasan ini penting dikemukakan sebab sangat erat kaitannya penulisan sejarah dengan pembahasan sejarah politik pada masa lampau.

Sebelum masa Ibnu Khaldun, seringkali tulisan-tulisan yang berkaitan dengan politik termuat dalam kumpulan kitab-kitab bernuansa fikih, seperti al-Ahkam al-Sulthainiyyah yang ditulis oleh seorang faqih, Imam Mawardi. Pada isi kitab tersebut terdapat kaidah-kaidah praktis yang menjelaskan tentang bagaimana cara-cara menjalankan sebuah politik.<sup>2</sup>

Dalam kondisi lain, berkembang suatu kelompok filsuf yang bercita-cita tentang negara yang ideal namun utopis dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis. Sedangkan, Ibnu Khaldun mempunyai metode tersendiri dalam membaca hal yang berkaitan politik dengan cara-cara yang realistis. Hal ini nampak tergambarkan pada bagian-bagian awal buku *Muqaddimah*. Dalam menulis sejarah, Ibn Khaldun mempunyai pandangan bahwa untuk menulisnya harus senyata mungkin. Tidak boleh dalam penulisan sejarah melakukan pengesampingan terhadap keinginan-keinginan politik dan mencampurkan perihal

---

<sup>2</sup> Muhliadi, "Kekuasaan dan Legitimasi Politik menurut Ibn Khaldun", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Fakultas Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik, Makassar, 2013) , 1.

yang bersifat imajinatif.<sup>3</sup> Artinya dalam menulis sejarah harus berdasarkan pada hasil temuan di lapangan dan ditulis secara objektif.

Ibn Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan ahli sosiologi, akan tetapi hasil pemikirannya terhadap dunia politik juga tidak bisa diragukan. Hal ini menjadi cerminan dari pengalaman hidup berpindah-pindah yang pernah ia alami. Ibn Khaldun dalam kehidupannya yang berpindah-pindah ini disebabkan oleh keadaan politik yang tidak stabil pada level negara. Kesesuaian cara pandang, pola-pola dalam berfikir, berkembangnya pengetahuan di bidang politik yang semakin komprehensif dan kedalaman ilmunya terhadap sejarah serta sosiologi menjadikan Ibn Khaldun mempunyai analisis untuk membaca pergerakan politik di masa depan.<sup>4</sup>

Dalam konteks kekinian, sebagaimana dengan berkembangnya kajian-kajian bertopik sosial dengan bahasan berbagai disiplin ilmu yang multidisipliner dan menghasilkan bermacam-macam kajian yang interdisipliner. Tentu hal yang kemudian menjadi penting bagi setiap kalangan akademis adalah mengkaji disiplin ilmu yang dinaunginya sebagai upaya peningkatan kualitas ilmu dan kepribadiannya. Dalam perkembangan ilmu politik dewasa ini banyak tokoh yang menyandarkan kekuasaan pada struktural kenegaraan.

---

<sup>3</sup> Ibid.,4.

<sup>4</sup> Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibn Khaldun and Islamic Thought-style A social perspective*. Terj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha, (cet II; *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 269.

Berangkat dari kenyataan ini, menjadi perlu untuk melihat keadaan realitas yang terjadi dan berkaitan dengan perihal kekuasaan. Sebagai contoh maraknya kasus jual beli jabatan, *ijon*<sup>5</sup> politik menjadi salah satu hal yang krusial di Indonesia pasca Era Reformasi. Tatanan yang demokratis yang dahulu dicita-citakan oleh para penggerak Reformasi seakan tidak mampu lagi untuk diusahakan.

Belakangan, di Indonesia sering kali terjadi penangkapan terhadap Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi. Beberapa kasus seperti tertangkapnya Bupati Sidoarjo oleh KPK dengan dakwaan kasus suap terhadap proyek infrastruktur<sup>6</sup> dan jeratan kasus yang menimpa Bupati Kota Waringin akibat menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan izin usaha pertambangan di wilayah terlarang.<sup>7</sup> Kedua contoh tersebut adalah sekelumit gambaran terhadap disorientasi tugas dan wewenang seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan. Adanya pemakaian kekuasaan yang kurang tepat dan perilaku etika politik yang

<sup>5</sup> Istilah *ijon* awal mulanya untuk menyebut perilaku tukar- guling suatu benda, umumnya sawah atau tanah yang mafhum digunakan oleh para petani Indonesia. Istilah ini sudah digunakan sejak dulu hingga sekarang. Tujuan dari *ijon* adalah mengadakan perjanjian tukar menukar untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan orang yang terjepit masalah. Dalam perkembangannya, istilah ini juga digunakan dalam dunia politik, yang mafhum diartikan sebagai pertukaran atau kontrak politik antara si pemberi dengan si penerima dengan jaminan pemberian hadiah yang lebih besar pada jasa yang telah diberikan. sebagai contoh dalam perihal ini, Seorang calon kepala daerah meminta bantuan dana kampanye pada seorang pembisnis dengan jaminan akan memberikan sejumlah proyek atau pembebasan perizinan pada bisnisnya. Lihat: <https://nasional.okezone.com>>Politik-Ijon-Akar-Munculnya-Pemimpin-Korup:OkezoneNasional (18 November 2015) Diakses pada 08 Februari 2020 03:27.

<sup>6</sup> <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200108223206-12-463662/kronologi-kasus-suap-bupati-sidoarjo> Diakses pada 08 Februari 2020 03:35.

<sup>7</sup> <https://www.google.com/amp/s/rmol.id/amp/2019/02/01/377096/https-hukum-rmol-id-read-2019-02-01-377096-kpk-tetapan-bupati-kotawaringin-timur-tersangka-penyalahgunaan-wewenang> Diakses pada 08 Februari 2020 03:40.

tidak sesuai dengan moral etik yang berlaku menjadi faktor terkuat terjadinya tindakan tersebut.

Kedua, Pada Massa Reformasi seperti saat ini, hak untuk berbicara di muka umum dan menyampaikan aspirasi dalam ranah publik dimiliki setiap orang, dan sangat menakjubkan bahwa media sosialpun digunakan menjadi salah satu alat atau media dalam menyampaikan suatu suara baik perorangan atau kelompok dalam rangka untuk mencapai sebuah kebebasan berekspresi. Adalah menjadi salah satu ciri perkembangan zaman dalam era Modern dan digitalisasi seperti saat ini. Kondisi ini jauh berbeda dengan keadaan 20 tahun silam, Indonesia berbalik 180 derajat. Negeri ini pernah memiliki catatan kelam terkait kebebasan bersuara untuk menyampaikan pandangan umum baik bersifat pribadi, kelompok maupun golongan.

Pada era Orde Baru, sangatlah dibatasi hak masyarakat Indonesia dalam menyuarakan dan berbicara di ruang publik, tidak terlalu berlebihan jika pada waktu menyebutkan bahwa HAM saat itu telah mati. Semua masyarakat dan kaum intelektualnya di kebiri oleh sang penguasa. Puncaknya Pada pertengahan tahun 1998 hingga awal tahun 1999 banyak terjadi pelanggaran HAM dan kekacauan yang menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto pada waktu itu. Setelah mengarungi lebih kurang 32 tahun masa kepemimpinan dari jabatan kepresidenan.

Timbulnya permasalahan tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan jabatan kepresidenan. Presiden yang mempunyai kekuasaan sebagai satu badan

dalam sebuah negara menyalahgunakannya dengan bersikap otoritarian dan represif terhadap warga negaranya. Hal ini menjadi salah satu cambukan yang menyebabkan terjadinya suatu kekacauan dalam sebuah negara.<sup>8</sup>

Hal inilah yang kemudian menjadi penting bagi penulis dan juga perlu bagi seluruh akademisi dan para pelaku politik, untuk dapat mempelajari serta memahami secara komprehensif arti dan makna kekuasaan serta memberlakukan kaidah etika politik yang berkeadaban. Dengan melihat kondisi yang sudah dipaparkan sebelumnya, kemudian menjadikan penulis membuka kembali khazanah keilmuan yang terkait kekuasaan dan etika politik yang pernah dicetuskan oleh seorang Muslim sekaligus menjadi sejarawan klasik yaitu Ibnu Khaldun.

Mengenai pokok pikiran Ibnu khaldun tentang kekuasaan dan etika politik, merupakan pengejawantahan dan eksplorasi pemikiran Ibn Khaldun terkait politik. Di mana ilmu politik pada saat ini mengundang banyak minat orang untuk mempelajarinya, terlebih bagi mereka yang mempunyai cita-cita dalam dunia politik atau yang berhubungan dengannya.

Ibnu Khaldun menyajikan konsep yang luas dalam penafsiran, mengelola, serta mengaplikasikan kekuasaan itu dalam kehidupan sosial yang nyata. Bagaimana kekuasaan itu bisa muncul, dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi berkembang, dari berkembang menjadi hilang. Akan tetapi dengan apa

---

<sup>8</sup> <https://www.kompasiana.com/windaagustina/57d2b8bbf17e61464e70e275/penyalahgunaan-kekuasaan-era-reformasi> (09 september 2016) diakses pada 07 februari 2020 20:11.



yang sudah disebutkan di atas, adalah menjadi salah satu modal untuk bisa memahami konsep kekuasaan dan etika politik bagi orang yang hendak terjun dalam dunia politik. Selain Ibn Khaldun, banyak tokoh lain yang mengungkapkan dan menafsirkan tentang kekuasaan dan etika politik.

Sebut saja misalnya, Michael Foucault mempunyai suatu konsep yang terkenal tentang relasi kuasa dan ilmu pengetahuan. Foucault menjelaskan, pola perilaku manusia dan interaksi sosial yang dibangunnya merupakan bagian dari pengaruh kekuasaan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ritzer tentang Foucault bahwa perubahan pola pikir Foucault secara genealogi atau arkeologi dipengaruhi oleh kekuasaan.<sup>9</sup> Ritzer mengungkapkan, kecenderungan Foucault yang bungkam terhadap kekuasaan pada era sebelum-sebelumnya.

Sesuai dengan pemaparan yang telah diuraikan Di atas, maka penulis hendak memunculkan Ibnu Khaldun dalam pembahasan kekuasaan sehingga dapat ditarik sebuah khazanah pemikiran yang lebih komprehensif dan mendalam. Penulis hendak mengungkapkan lebih luas dan mendalam mengenai pandangan Ibn Khaldun terkait kekuasaan dan etika politik.

Pembahasan yang penulis uraikan nantinya ialah mengenai bagaimana kekuasaan dan etika politik menurut Ibnu Khaldun yang kebanyakan pandangan-pandangannya terkait hal ini dituangkan dalam karyanya yang monumental yaitu *Muqaddimah*, Sehubungan dengan hal tersebut, penulis juga membatasi kajian ini

---

<sup>9</sup> George Ritzer, *The Postmodern Social Theory*, Terj. Muhammad Taufik; Teori Sosial Post Modern, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 78.

pada Buku Muqaddimah. Harapan selanjutnya dengan adanya karya ilmiah ini, penulis khususnya dan juga para akademis serta masyarakat luas secara umum dapat mengetahui lebih detail mengenai khasanah keislaman yang diwariskan oleh Ibnu Khaldun khususnya bidang politik Islam.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bahasan di atas digunakan untuk menjadi landasan penelitian. Untuk menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, penulis rumuskan beberapa pertanyaan antara lain:

1. Bagaimana Sejarah kehidupan Ibn Khaldun dan perkembangan pemikirannya?
2. Bagaimana pemikiran Ibn Khaldun mengenai kekuasaan dan etika politik serta implementasinya dalam kehidupan sosial politik ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan bertujuan :

1. Untuk mempelajari tentang riwayat hidup Ibn Khaldun dan perkembangan pemikirannya.
2. Untuk memahami pemikiran Ibn Khaldun mengenai kekuasaan dan etika politik serta implementasinya dalam kehidupan sosial politik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini membantu meningkatkan basis pengetahuan kita tentang kekuasaan dan etika politik Ibn Khaldun.
- b. Untuk menjadi bahan teori dalam menulis karya ilmiah.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bermanfaat bagi pengembangan dunia keilmuan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya jurusan Sejarah Peradaban Islam.
- b. Sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat agar mengetahui sejarah kehidupan Ibn Khaldun serta pemikirannya tentang Kekuasaan dan Etika Politik.

### **E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik**

Pembahasan dalam penelitian ini Skripsi ini disusun dan ditulis dengan menggunakan pendekatan Historis (Sosiologi-Sejarah). Dengan pendekatan Historis penulis bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang telah terjadi di masa lampau. Sedangkan pendekatan Sosiologis digunakan dalam menggambarkan masa lalu, maka akan terlihat faktor-faktor sosial dari peristiwa yang akan dikaji. Merekonstruksi sejarah melalui pendekatan sosiologis itu dapat juga disebut sebagai Sejarah Sosial, karena pembahasannya mencakup golongan

sosial seperti status sosial, konflik berdasarkan kepentingan, pelapisan sosial, jenis hubungan sosial, dan masih banyak lagi.<sup>10</sup>

Penulis disini juga menggunakan kerangka teori yang dimiliki oleh wilhem dilthey yaitu hermeneutika.<sup>11</sup> Hermeneutika dilthey ini penulis gunakan untuk melakukan pendekatan dari biografi Ibn Khaldun, dengan bertujuan memahami kepribadian tokoh tersebut. Dilthey menjelaskan bahwa manusia berbeda dengan objek fisik karena memiliki psikologi batin, dengan kata lain aspek psikologis.

Artinya, dalam mengetahui pemikiran Ibn Khaldun tidak bisa dengan sebatas membaca karya-karya yang pernah ditulisnya tanpa pemahaman yang mendalam, sehingga penulis menggunakan hermeutika dilthey ini untuk memahami karya-karya Khaldun. Karena bahasa adalah ekspresi kehidupan batin manusia yang paling lengkap, hermeneutika dianggap sebagai pemahaman penjas model ekspresi bahasa dalam proses pemahaman ilmiah manusia.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya diperlukan untuk mengkonfirmasi dan mengoreksi kekhususan penelitian yang akan dilakukan. Dan mengetahui keaslian data yang dipelajari oleh peneliti sebelumnya, sebagai titik awal yang selalu berbeda dengan peneliti lainnya. Dalam studi sebelumnya terdapat:

<sup>10</sup> Dudung Abdurahman, *metodologi penelitian sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)*, 11

<sup>11</sup> Wilhelm Dilthey, *Pattern and Meaning in History: Thoughts on History and Society* (New York: Harper Torchbooks, 1962), 37

1. Skripsi dengan judul “*Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Menurut Ibn Khaldun*” oleh Muhliadi, Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar tahun 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ibn Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi politik.<sup>12</sup>
2. Skripsi dengan judul “*Etika Dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli Atas Etika Dan Kekuasaan Dalam Ranah Politik*” oleh Haikal Mujahid, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Etika dan Kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli.<sup>13</sup>

#### G. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pandangan Ibn Khaldun Tentang Kekuasaan dan Etika Politik dalam Kitab Muqaddimah” ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah yaitu :

##### 1. Heuristik

Heuristik adalah langkah pertama dalam penelitian sejarah. Pada level ini peneliti melakukan suatu kegiatan yaitu mengumpulkan data atau sumber, data sejarah atau bukti sejarah yang diperlukan untuk melakukan penelitian.<sup>14</sup>

Sejarawan atau peneliti dapat mengumpulkan beberapa data, atau mereka dapat

<sup>12</sup> Muhliadi, “*Kekuasaan dan Legitimasi Politik menurut Ibn Khaldun*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Fakult as Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik, Makassar, 2013) , 1.

<sup>13</sup> Hakim Mujahid, “*Etika Dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli Atas Etika Dan Kekuasaan Dalam Ranah Politik*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Fakult as Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jakarta, 2011) , 1.

<sup>14</sup> Helius syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2007), 55

merekam sumber daya terkait yang digunakan dalam karya sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti atau penulis sejarah mulai dapat mengekstraksi situs sejarah sebanyak mungkin. Kemudian peneliti melihat setiap jejak dan komponennya, selalu menganalisis apakah benar dan apakah itu data historis.<sup>15</sup>

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah maupun riwayat hidup Ibn Khaldun dan pemikiran-pemikirannya, khususnya mengenai Kekuasaan dan etika Politik, baik berupa sumber primer ataupun sumber sekunder. Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer diantaranya:

- a. Buku Muqaddimah, dalam buku ini menghimpun informasi mengenai riwayat hidup Ibn Khaldun dan perjalanannya dalam pengembaraan mencari ilmu hingga pada titik akhirnya menjadi buku ini sendiri. Dalam Buku ini juga banyak memuat mengenai pemikiran-pemikiran Ibn Khaldun mengenai sejarah, sosiologi dan politik.
- b. Sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, artikel maupun kumpulan tulisan lain yang mengulas mengenai kiprah dari Ibn khaldun baik dalam sektor pendidikan, sejarah, pemerintahan, sosial maupun politik. Seperti Skripsi yang ditulis oleh muhliadi tentang pemikiran Ibn Khaldun mengenai Kekuasaan dan legitimasi politik maupun skripsi yang ditulis oleh Hakim Mujahid tentang Etika Dan Kekuasaan.

---

<sup>15</sup> Dudung, Metode Penelitian, 55

2. Kritik sumber, ialah cara untuk meneliti apakah sumber yang didapat benar dan terjaga keabsahannya. Kritik sumber dibedakan menjadi dua, yaitu kritik intern dan ekstern. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Buku Muqaddimah karya Ibn Khaldun yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar dalam bentuk terjemahan sebagai sumber utama, meski buku yang digunakan dalam bentuk terjemahan, penulis yakini tidak ada perubahan isi secara substansi dengan karya aslinya. pembagian babnya juga sesuai dengan kitab aslinya. Selain itu, penulis juga tidak menemukann bantahan bersifat akademis terhadap otensitas buku ini, baik dalam buku, jurnal, atau karya ilmiah yang lainnya. Buku Muqaddimah ini juga menjadi salah satu buku baku yang sudah diakui kredibilitasnya sebagai salah satu karya dari Ibn Khaldun serta menjadi rujukan untuk dapat mengetahui tentang banyak hal terhadap Ibn Khaldun.
3. Interpretasi dapat dikatakan mengkaji atau menafsirkan sumber-sumber yang telah di dapatkan oleh peneliti. Sumber atau data sejarah yang telah melalui tahapan kritik harus melalui tahapan ini. Pada tahapan ini sumber-sumber atau data-data yang telah diperoleh penulis ditafsirkan agar memperoleh gambaran tentang Pandangan Ibn Khaldun Tentang Kekuasaan dan Etika Politik.
4. Historiografi, dalam tahapan ini penulis menguraikan judul yang dipilih dengan pembahasan-pembahasan yang terbagi menjadi bab-bab tersendiri yang saling berkesinambungan. Pada bagian awal, penulis menyajikan sejarah kehidupan sang tokoh Ibn Khaldun dengan menarik garis sejarah dari masa kecil, lingkungan hidupnya, kemudian pendidikan dan kiprah dalam dunia politik. Pada bagian kedua, penulis sajikan mengenai pemikiran kontemporer

mengenai kekuasaan dan etika politik yang diambil dari beberapa tokoh, diantaranya Nicollas Machiavelli. Alasan penulis menyajikan pembahasan ini sebagai titik persinggungan pemikiran kontemporer tentang kekuasaan dan etika politik dengan pemikiran politik kekuasaan dan etika politik yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun dan juga menjadi pembeda. Pada bagian selanjutnya, penulis secara khusus dan terperinci mengulas pemikiran Ibn Khaldun tentang kekuasaan dan etika politik.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penyusunan bahasan dalam skripsi ini, laporan penelitian ini disusun dengan beberapa bab, pembagian ini berguna untuk menganalisis hubungan satu bagian dengan bagian yang lainnya:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, merupakan landasan awal penelitian, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan pendekatan, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan bagaimana biografi Ibn Khaldun. Dalam bab ini, penulis menjabarkan biografi Ibn Khaldun diawali dari sejarah hidup Ibn Khaldun, yang meliputi nasab beliau, kehidupan masa kecil dan lingkungan hidupnya, kemudian masa pendidikan Ibn Khaldun, guru-guru dan murid-murid



Ibn Khaldun, corak pemikiran dan karya-karyanya serta Kiprahnya dalam dunia politik.

Bab ketiga, berisi tentang penjabaran mengenai kekuasaan dan etika politik secara luas, dalam bab ini penulis memaparkan pandangan-pandangan terkait kekuasaan dan etika politik dari berbagai tokoh kontemporer. Perlunya bab ini penulis jabarkan yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan-pandangan tokoh kontemporer terkait kekuasaan dan etika politik dengan tujuan untuk memberi titik singgung perbedaan ataupun kesamaan dengan pandangan Ibn Khaldun tentang kekuasaan dan etika politik.

Bab keempat, menjadi bagian yang secara terperinci dan khusus untuk menjelaskan pandangan-pandangan Ibn Khaldun dalam perihal kekuasaan dan etika politik.

Bab kelima, menjadi bagian terakhir dalam penyusunan skripsi ini, sekaligus menjadi penutup. Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil keseluruhan penjabaran bab-bab sebelumnya dan jawaban yang ada pada rumusan masalah, serta saran yang ditujukan kepada setiap pembaca skripsi ini untuk kemajuan penelitian selanjutnya dan perbaikan-perbaikan jika diperlukan.

## BAB II

### Deskripsi Kekuasaan dan Etika Politik

#### A. **Kekuasaan**

Kekuasaan adalah suatu hal yang berhubungan erat dengan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan kaitannya dengan kekuasaan. Dalam menjalankan kehidupan manusia tidak bisa melepaskan tanggungjawabnya dari segala urusan dengan manusia lain atau masyarakat. Sebagai bagian dari fitrah ini akan ada kecenderungan untuk saling menguasai meskipun harus dilaluinya dengan segala cara yang menimbulkan kekacauan, penindasan dan otoriter. Realitas ini yang kemudian harus dijawab manusia dengan menggunakan kemampuan berfikir dan bertindak untuk mewujudkan keharmonisan, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

Untuk mencapai kemakmuran dan keharmonisan, sangat dibutuhkan individu atau penguasa yang dapat membuat pengaturan dan koordinasi yang efektif. Jika ini bisa dilakukan maka akan membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik. Seorang tokoh politik Islam, Ibnu Taimiyah pernah berargumen bahwa dalam suatu kelompok masyarakat, sekalipun ia pemaarah dan kejam, alih-alih tidak dipimpin oleh siapa pun, dibutuhkan pemimpin yang kuat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibn Taimiyah, *al-Istiqâmah*, (Madinah: Jamiah al-Imam Muhammad bin Su'ud, 1403 H), 321.

Pada dasarnya dapat dijelaskan bahwa suatu jenis kekuasaan mempunyai urgensi dalam pembentukannya dan harus diciptakan dan dijalankan pada waktu yang bersamaan. Jika tidak ada penguasa dan kekuasaan dalam komunitas manusia, hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan permusuhan dan keresahan diantara komunitas itu sendiri. Sejarawan Ibn Khaldun juga berbagi pendapat ini. Dalam pandangannya kekuasaan adalah hal yang wajar, dan keberadaan kekuasaan itu nyata.

Namun dengan melihat fakta di atas tentang perlunya kekuasaan di suatu kelompok atau negara tertentu. Di sisi lain, kekuasaan yang ada dan dijalankan juga harus memenuhi kebutuhan keseimbangan hidup manusia, perdamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, semua tanggung jawab menjadi tanggung jawab bersama, sehingga ketertiban tetap dapat dihasilkan. Penting untuk memahami sebanyak mungkin konsep kekuasaan yang dapat dijalankan baik oleh penguasa maupun masyarakat. Untuk ini, kita harus mengetahui ini dari definisi kekuasaan itu sendiri.

Adanya kekuasaan adalah pengaruh nyata atau potensial. Dari para pemikir masa lampau hingga masa kini, dari para pemikir Yunani kuno, editor epos Mahabarata, Bharatayudha dan Ramayana hingga Ibn Khaldun dapat melihat asal mula kekuasaan.

Tokoh pemikir era modern dari Barat seperti Hobbes (1588-1672), Locke (1632-1704), dan Machiavelli (1469-1527) meletakkan manusia sebagai aktor

rasional, sehingga muncul konsep kekuasaan rasional.<sup>17</sup> Selain para pemikir tersebut, Karl Marx, Habermas, Foucault, Gazari, dan Gidens juga disebut-sebut mempunyai pengertian yang berbeda terkait kekuasaan. Oleh karena itu, kita perlu memahami kekuasaan dari etimologi dan terminologi untuk mencerminkan pemahaman kita tentang makna kekuasaan itu sendiri dan cara kerjanya.

### 1. Definisi Kekuasaan

Secara etimologis kekuasaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *power* berarti tindakan dan kemampuan untuk bertindak. Kekuasaan adalah kekuatan yang diperoleh individu atau kelompok dalam menjalankan kekuasaan tersebut di bawah kekuasaan yang diberikan. Pelaksanaan kekuasaan tidak boleh melebihi kekuasaan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau suatu kelompok atas kehendak si pelanggar. Kekuasaan juga mempengaruhi kemampuan pihak lain untuk berpikir dan bertindak sesuai keinginannya sendiri.

Max Weber, sebagaimana dikutip Roderick Martin, memberikan definisi kekuasaan sebagai kemungkinan aktor mewujudkan cita-citanya dalam komunitas manusia dengan kekuatan atau terlepas dari fondasi yang mendasari kemungkinan ini.<sup>18</sup> Menurut Dahl, power identik dengan pengaruh, otoritas dan pemerintahan.<sup>19</sup> Kekuasaan merupakan suatu konsep yang berkaitan erat dengan masalah pengaruh, manipulasi, paksaan, kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan juga

<sup>17</sup> M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 223.

<sup>18</sup> Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 70.

<sup>19</sup> Muhliadi, "*Kekuasaan dan Legitimasi Politik menurut Ibn Khaldun*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Fakultas Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik, Makassar, 2013), 21.

dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain agar orang lain dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa.<sup>20</sup>

Muhliadi dalam skripsinya "*Kekuasaan dan Legitimasi*" menerangkan, kekuasaan merupakan suatu potensi pengaruhi dari seorang pemimpin. Keberhasilan pemimpin sangat bergantung pada kemampuannya untuk memahami situasi dan kemampuannya untuk mengidentifikasi jenis kekuatan yang diperlukan untuk menanggapi situasi tersebut.<sup>21</sup> Artinya kemampuan berkuasa seseorang dilihat dari sejauh mana dia dapat memberi pengaruh kepada pihak lain.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak ahli telah membahas tentang konsep kekuasaan. Oleh karena itu, kuasa memiliki banyak varian dalam penafsirannya. Eman Hermawan yang mengutip Sallie Westwood dalam risetnya menyatakan ada beberapa hal yang terkait kekuasaan, antara lain<sup>22</sup> :

1. Kekuasaan dianggap sebagai kompetisi, dan fokusnya ada pada dua kata kunci, yaitu represi dan koersi. Konsep nol dan kekuasaan membentuk kontras antara yang kuat dan yang tidak kompeten.
2. Kekuasaan dipahami sebagai produk pemikiran hegemoni dan anti-hegemoni
3. Sebagai konsekuensi atas pandangan yang bersifat kompetitif, kekuasaan dianggap sebagai manipulasi dan strategi.

<sup>20</sup> Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, 223.

<sup>21</sup> Muhliadi, "*Kekuasaan dan Legitimasi*.....", 22.

<sup>22</sup> Eman Hermawan, *Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*, (Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001), 219.

4. Kekuasaan terkait dengan pengetahuan, disiplin dan tata kelola.
5. Kekeuasaan performatif adalah produk dari pelanggaran dan kehancuran.

Pakar politik Indonesia Miriam Budiardjo pernah mengutarakan pandangannya tentang kekuasaan. Selain kekuasaan dengan ciri khasnya sendiri, kekuasaan juga merupakan hal yang abstrak, interaksi sosial yang egois dari para pemegang kekuasaan yang kerap menyalahgunakan kekuasaan.<sup>23</sup>

Uraian di atas memiliki definisi yang jelas tentang kekuasaan, namun menurut sosiolog modern Dahrendorf masih memiliki beberapa kekurangan. Dia percaya bahwa kekuasaan jelas merupakan sesuatu yang dimiliki kelompok, itu milik individu daripada struktur sosial.<sup>24</sup>

Politisi Prancis Machiavelli sering dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang memiliki pandangan jahat. Machiavelli dikenal sebagai seorang pemikir politik yang berjasa memikirkan negara dan penguasa yang nilai-nilainya jauh dari etika dan moralitas.

Namun, jika esensi dari dua karyanya "*Prince*" dan "*The Curse*" diadopsi, setidaknya dapat dilihat dari sudut pandang Machiavelli bahwa terkadang penguasa baru harus mengambil tindakan tertentu untuk meningkatkan kekuasaannya. Langkah-langkah ini untuk memastikan kekuatannya sampai dia

---

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 31-32.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 71.

terpaksa melakukan hal-hal yang membuat masyarakat tidak puas.<sup>25</sup> Machiavelli akan penulis jadikan sebagai tokoh pembanding bagi Ibnu Khaldun

## 2. **Menjalankan Kekuasaan**

Baik dengan kedok demokrasi, komunisme atau agama, ada banyak cara untuk mempertahankan kekuasaan, dari moralitas hingga kekejaman. Karena politik selalu mengajarkan bagaimana mempertahankan kekuasaan.

Dalam negara demokrasi dimana rakyat memegang kekuasaan, cara untuk meraih kekuasaan melalui cara lain selain birokrasi biasanya melalui jalur partai. Kemudian, parpol mengirimkan calon untuk mengikuti sidang legislatif. Inilah gambaran demokrasi modern. Betapa pun realitas yang terjadi dalam politik dunia saat ini, kekuasaan dalam konsep demokrasi selalu ada di tangan rakyat.

Samuel Huntington dalam karyanya "Benturan Peradaban" menjelaskan, konsep demokrasi yang digembor-gemborkan saat inipun adalah upaya Barat untuk menghegemoni dunia.<sup>26</sup> Oleh karena itu, jelaslah bahwa apapun konsep politik yang diperkenalkan ke dunia ini, jelas semuanya akan mengarah pada tujuan kekuasaan permanen.

Mengingat sebelum zaman modern, filsuf politik telah memperkenalkan berbagai teori kekuasaan. Tetapi bagaimana kekuatan ini bertahan, Dari Aristoteles tentang konsep Republik yang dicitakan, Thomas Aquinas mengemukakan teori yang didasarkan pada Tuhan, teori tangan besi mulai dipraktikkan oleh diktator hingga konsep negara ideal yang dikejar oleh Marx.

---

<sup>25</sup> Ibid., 75.

<sup>26</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, (Yogyakarta: Qalam Press, 2003), 9.

Jika dilihat dari sudut pandang teoritis dan tujuan pencipta, sebenarnya konsep di atas memiliki tujuan yang baik. Namun, ketika penerusnya yang menjalankan, muncul dampak negatif seperti teori Marx yang dipraktekkan oleh Lenin, Stalin, Mao Zedong dan lain-lain, mereka semua berharap bisa membangun negara komunis yang dicita-citakan oleh Karl Marx.<sup>27</sup>

Biasanya, kekuasaan dengan sifat negatif hanya dapat mencari keuntungan individu atau kelompok. Karena mereka tidak mempunyai kemampuan atau modal lain selain kekuatan untuk menghasilkan segalanya, dan pemegang kekuasaan bersifat pasif, maka kekuasaan ini tidak akan bertahan lama, karena mereka tidak akan mendapat dukungan penuh dari rakyat.

Oleh karena itu, apa pun ideologi politik yang didebat dan disadari oleh politisi, mereka ingin mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki. Namun, mempertahankan kekuasaan ini membutuhkan penguasa untuk mengatasi dua aspek yang berbeda. Pertama, mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan individu atau kelompok, dan kedua, memelihara kekuasaan untuk stabilitas dan kesejahteraan negara.

#### B. **Etika Politik**

Sejak zaman Aristoteles di Yunani kuno, penelitian etika memang telah dibahas. Namun, meski sudah dibahas, masih ada konflik terkait masalah moral ini. Karena istilah etika yang dikemukakan oleh para filosof masih pada tataran

---

<sup>27</sup>Darsono, *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 29.



prinsip moral dasar. Oleh karena itu, Moore menyebutnya sebagai *fallacy* (kekeliruan).<sup>28</sup>

Etika dan kekuasaan berasal dari kata-kata yang berbeda. Istilah ini memiliki disiplin ilmu tersendiri. Namun krisis yang melanda dunia saat ini adalah tidak ada masalah etika dalam semua masalah, terutama kekuasaan. Persoalan moralitas dan kekuasaan sangat sensitif, karena kedua unsur ini selalu saling melengkapi. Baik itu etika politik, filosofi etika, etika bisnis atau relativisme etika, atau bahkan etika pemerintahan atau etika kekuasaan.

Etika dan kekuasaan telah menjadi dua istilah yang identik dalam tatanan kehidupan berbangsa. Etika adalah salah satu mata pengontrol untuk mewujudkan kekuasaan. Namun, pandangan etika inilah yang membuat banyak filsuf berbeda ketika mereka mendefinisikan istilah etika. Karena moralitas biasanya baik dalam suatu komunitas atau negara, tetapi belum tentu negara lain menganggapnya baik.<sup>29</sup>

Secara umum etika sering diartikan sebagai suatu sistem sopan santun yang dihasilkan dalam hati nurani manusia. Tingkah laku yang baik ini akan menghasilkan tingkah laku yang baik dan buruk sebagai pribadi (termasuk penguasa). Hal ini sering disebut dengan the rule of life, karena Anda ingin menyenangkan orang lain.<sup>30</sup>

Masalah etika termasuk masalah relatif yang tergolong dalam bidang norma, dalam bidang tersebut etika dipandang dari berbagai sudut yang

---

<sup>28</sup> Mohammad Ali, *Relativisme Etika*, (Bandung: Serambi, 2005), 31.

<sup>29</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 12.

<sup>30</sup> Widjaja, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), viii.

kesemuanya memiliki argumennya sendiri-sendiri.<sup>31</sup> Menurut George Edward Moore, teori etika yang dikemukakan oleh setiap pakar mulai dari Aristoteles hingga David Hume menggunakan kata etika berdasarkan karakteristik tertentu saja. Oleh karena itu, Moore percaya bagaimana para penguasa bertindak secara moral dari perspektif kebaikan dasar.<sup>32</sup>

Pandangan para pemikir berbeda dalam ekspresi etika dan kekuasaan, karena beberapa pihak meyakini bahwa dalam pemerintahan suatu negara, etika adalah kesopanan, kejujuran atau perilaku baik yang dituntut oleh kekuasaan. Teori ini sejalan dengan pandangan Aristoteles, Plato dan pemikir Yunani lainnya. Di mana kala itu mereka memandang negara kota (*city state*) sedang dalam keadaan stabil. Bahkan, Ada pemikir lain yang percaya bahwa etika suatu negara telah diatur oleh Tuhan, dan Tuhan telah mewahyukan kepada hamba-Nya melalui kitabnya. Hal ini dapat dilihat dalam etika kebangsaan yang dianut oleh Paus, seperti yang ditulis oleh Agustinus dalam karyanya "*City of God*."<sup>33</sup>

Menurut Machiavelli, kekuasaan dan moralitas adalah dua ilmu yang berbeda, tetapi dalam praktik politik selalu sama.<sup>34</sup> Machiavelli melihat moralitas sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Asumsi moral diperlakukan sebagai entitas independen. Moralitas merupakan bagian dari power strategy, power strategy tidak selalu berkaitan dengan hal baik dan buruk, realistik dan objektif, tidak universal. Itu dapat diubah kapan saja sesuai dengan kondisi

---

<sup>31</sup> Ali, *Relativisme*, 33.

<sup>32</sup> Franz Magnis Suseno, *Dua Belas Tokoh Etika Abad ke-20*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 17.

<sup>33</sup> Mushadi Mandiri. dkk, *Membangun Negara Bermoral*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra Semarang, 2004), 1.

<sup>34</sup> Niccolo Machiavelli, *The Prince*, (Surabaya: Selasar Publishing, 2008), 18.

sosial.<sup>35</sup> Penguasa yang berperilaku baik kepada rakyat dalam tatanan sosial dan politik yang mapan dianggap sebagai bagian dari strategi kekuasaan. Tujuannya untuk mencapai legitimasi kekuasaan.

Pada saat yang sama, pemikir lain seperti Russell dan Kant menggunakan moralitas sebagai dasar untuk berpikir tentang pelaksanaan kekuasaan oleh para penguasa. Ini juga berarti bahwa hubungan antara moralitas dan kekuasaan bukan hanya hubungan strategis, tetapi juga kewajiban yang harus dilakukan oleh penguasa. Pengajaran moral tidak selalu mengarah pada asumsi teologis tertentu, tetapi bersifat universal, yaitu humanisasi.

Konsep kekuasaan dan etika selalu mengemuka dalam penelitian filsafat politik, sehingga kekuasaan masih berkaitan dengan ketinggian kepribadian.<sup>36</sup> Di satu sisi, kekuasaan memiliki nilai yang ideal dan merupakan sarana untuk mewujudkan keinginan masyarakat. Namun di sisi lain, kekuasaan sama dengan praktik politik berbagai upaya penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan berpartisipasi dalam perdebatan tentang nilai dan praktik. Nilai ideal terkait dengan persyaratan moral yang seharusnya dimiliki oleh penguasa. Pada saat yang sama, dalam praktiknya, kekuasaan menghadirkan fenomena yang sulit dan rumit, yang realistis dan mengubah kebutuhan pribadi penguasa itu sendiri.

Pemikiran Niccolo Machiavelli identik dengan kondisi tersebut. Situasi sosial dan politik yang tidak stabil menuntut pihak berwenang untuk melakukan segala upaya untuk melanggengkan kekuasaan, karena pada waktu itu Florence

---

<sup>35</sup> Ibid., 19.

<sup>36</sup> A. Rahman Zinuddin, *Kekuasaan dan Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 139.

sedang dalam ancaman kehancurannya.<sup>37</sup> Pilihan tidak memiliki kekuatan yang stabil hanya akan meninggalkan suasana ketidakpastian di dalam negeri. Akibatnya, *rule plan* sulit dilaksanakan, dan kekuasaan harus beradaptasi dengan berbagai kepentingan masyarakat.

Machiavelli beranggapan, nilai moral tertinggi adalah negara yang bijak, dia menyebutnya orang bijak, stabilitas, dan tindakan yang diambil oleh penguasa adalah melindungi negara. Dengan cara ini, dia membenarkan perilaku kejam penguasa. Tapi yang paling penting adalah otoritas tidak boleh dibenci.<sup>38</sup>

Mengenai kualitas lainnya sebelum diangkat, penulis percaya bahwa setiap penguasa harus dianggap penyayang, bukan kejam. Tapi dia tidak boleh menyalahgunakan simpati ini. Cesar Borgia dianggap sebagai sosok yang kejam, tetapi kekejamannya telah menertibkan Romagna, menyatukannya, dan memulihkannya ke perdamaian.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, untuk memahami esensi dan relevansi moralitas dan kekuasaan diperlukan upaya-upaya besar agar ketika menilai para filsuf politik tidak jatuh ke sisi negatif. Karena mereka juga memiliki dalil-dalil yang kuat yang memaksa mereka untuk mendefinisikan etika dan kekuasaan. Untuk cita-cita kesejahteraan dan stabilitas negara, khususnya di bidang politik.

#### 1. **Definisi Etika**

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, secara etimologi artinya tempat tinggal, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir.

---

<sup>37</sup> Machiavelli, *The Prince*, 167.

<sup>38</sup> *Ibid.*, x.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 119.

Secara jamak *ta etha* artinya adat kebiasaan. Kata inilah yang menjadi titik dasar lahirnya nama etika yang disebut Aristoteles. Definisi etika pun sering disamakan dengan moral, di mana kata moral ini berasal dari bahasa latin *mos (mores)* artinya kebiasaan atau adat.<sup>40</sup>

Dalam pengertian maknanya, Bertens Mengemukakan etika dalam tiga unsur yaitu: Pertama, etika adalah nilai moral dan kode etik yang menjadi acuan dalam mengatur individu atau kelompok untuk mengatur perilakunya. Misalnya, jika seseorang menyebutkan etika agama Protestan, Budha, etika India, maka ini berlaku baik untuk individu maupun masyarakat. Kedua, etika mengacu pada prinsip atau nilai moral yang disebut juga etika, seperti etika rumah sakit. Ketiga, etika, inilah ilmu tentang baik dan buruk.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, terlihat bahwa K. Bertens memberikan arti dari kata etika yaitu aturan nilai di lapangan, dan menjelaskan yang baik dan yang buruk. Sedangkan Ahmad Charis mengambil definisi etika sebagai filosofis dengan memberikan informasi tentang kualitas perilaku atau perilaku manusia.<sup>42</sup>

Etika atau dalam beberapa hal sering disebut moral adalah pemikiran kritis dasar tentang doktrin dan opini moral. Etika merupakan ilmu yang membahas mengapa dan bagaimana mengikuti doktrin moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai doktrin moral. Etika termasuk dalam kelompok filsafat praktis yang terbagi dalam etika tertentu, yaitu etika yang membahas prinsip-prinsip berbagai aspek

---

<sup>40</sup> K. Bertens, *Etika*, 4.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>42</sup> Ahmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 14.

kehidupan manusia, sedangkan etika umum adalah etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip perilaku setiap manusia.

Sedangkan Katsoff berpendapat, etika lebih memperhatikan prinsip-prinsip dasar pertahanan yang berkaitan dengan perilaku manusia, dan juga landasan filosofis yang terkait dengan perilaku manusia. Begitu juga Moore memberikan definisi etika bahwa etika tidak hanya membahas persoalan baik dan buruk, karena menurutnya definisi ini masih terjebak dalam konsep kondisi fisik, psikis, dan metafisik yang dipengaruhi oleh pemahaman seseorang terhadap agama atau adat istiadat tertentu. Ia meyakini bahwa moralitas merupakan ciri utama, yang tidak lagi tersusun dari komponen atau elemen, sehingga tidak dapat dianalisis.<sup>43</sup>

Dari semua definisi, maka jelas apa yang dikatakan Moore bahwa para filosof telah terjebak pada pengertian etika yang menurutnya masih keliru. Hal ini tidak hanya terjadi di zaman dahulu. Justru bila diperhatikan secara seksama, maka tidak ada perbedaan dengan para tokoh etika saat ini. Terlihat di mana definisinya masih saja menggunakan etika itu pada tataran normatif.

Namun, jika kita melihat lebih dekat pada etika, itu memiliki arti dan cakupan yang begitu luas sehingga kata yang kasar tidak berarti amoralitas, tetapi dalam kondisi apa kata tersebut digunakan. Ini tidak berarti bahwa tidak bermoral bagi seorang kepala negara untuk membunuh beberapa pemberontak atau melancarkan perang untuk kesejahteraan rakyatnya. Bagaimanapun, moralitas

---

<sup>43</sup> Franz, *Dua Belas Tokoh Etika Abad ke-20*, 20.

adalah bagaimana manusia memanfaatkan situasi dan kondisi dengan lebih baik dan merupakan prioritas pertama.

Dibandingkan dengan tokoh lainnya, Franz Magnis Suseno memberikan definisi yang lebih tepat. Ia memberikan definisi etika, yaitu sebagai ilmu yang mencari arah usaha manusia, menjawab pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu bagaimana saya harus hidup dan bertindak. Kemudian, manusia akan belajar menemukan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>44</sup>

## 2. **Kebutuhan Etika dalam Politik dan Sebuah Negara**

Kehidupan bernegara dimulai sebagai hasil dari sosialisasi umat manusia, dimana manusia merasa membutuhkan satu sama lain. Tetapi karena sifat manusia yang tamak, jahat, dan haus kekuasaan, Thomas Hobes menyebutnya Selfish (egois).<sup>45</sup>

Dalam buku "*The Prince*", Niccolo Machiavelli mengatakan, "sekarang kita bicara soal yang terpenting dari sifat-sifat. Seperti yang disebutkan, Penguasa harus menghindari hal-hal yang akan direndahkan atau dihina. Jika dia berhasil, itu berarti dia telah melakukan tugasnya dan tidak akan menemui bahaya dalam kejahatan lainnya. Jika dia serakah, tamak dan menyita harta benda warganya dan wanitanya, dia akan dibenci. Jika dia tidak menyerang harta atau kehormatan mereka, mereka akan hidup bahagia."<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 13.

<sup>45</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik Barat: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Modern*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 310.

<sup>46</sup> Machiavelli, *The Prince*, 127.

Terlihat jelas dari pernyataan Machiavelli bahwa sosok ini sangat mendukung nilai-nilai moral di suatu negara, meskipun dia adalah orang yang benar-benar tidak memperbolehkan korupsi. Terlepas dari apakah ini strategi atau bukan, yang terpenting ajarannya mengandung kebutuhan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral suatu negara.

Perwujudan dari konsep etika adalah mempertahankan kekuasaan negara yang sejahtera, baik dalam bentuk republik demokratis, monarki, atau republik aristokrat. Apalagi jika yang terjadi bertolak belakang dengan sistem sebelumnya, yaitu demokrasi menjadi sistem otokrasi, monarki menjadi aturan otokrasi, dan aristokrasi menjadi oligarki.<sup>47</sup> Untuk menjaga negara dalam keadaan kacau, sangat penting untuk memiliki pendirian moral di dalamnya.

Menurut Paul Ricour hal ini bisa dilihat dari tiga penjelasan.<sup>48</sup> Pertama, betapa kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Disini letak celah dimana etika politik bisa berbicara dengan otoritas.

Kedua, Etika politik berbicara dari perspektif korban. Korban menimbulkan respon simpatik dan marah (campur tangan dan protes terhadap perilaku tidak adil). Keberpihakan tidak akan mentolerir politik yang keras. Jeritan korban merupakan kabar buruk bagi moralitas politik. Ketiga, perebutan kekuasaan yang berkepanjangan dan konflik kepentingan akan membuat

---

<sup>47</sup> Carlton Rode. Dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1988), 51.

<sup>48</sup> Widjaja, *Etika Pemerintahan*, 30.



masyarakat menyadari bahwa solusi yang adil sangat dibutuhkan. Tanpa mengacu pada etika politik, solusi ini tidak akan terwujud. Orang sering mengatakan bahwa “perubahan harus sesuai dengan konstitusi”, yang menunjukkan bahwa etika politik tidak bisa diabaikan.

### C. Hubungan Antara Kekuasaan dan Etika Politik

Secara konseptual, kekuasaan dan etika politik memang memiliki domainnya masing-masing. Namun, karena keduanya selalu bersinggungan dengan isu kemanusiaan, sudah sepantasnya keduanya selalu bertemu dalam satu bidang, dan kedua bidang tersebut menjadi pembinaan hubungan kebangsaan. Realitas politik adalah memperebutkan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan. Politik tidak didasarkan pada hal yang sudah ada, bukan cita-cita yang harus diikuti. Baik secara politik maupun dalam tatanan demokrasi, kecenderungan umum membuktikan adanya sikap menghalalkan segala cara, selaras dengan filsuf Italia Niccolo Machiavelli.<sup>49</sup>

Sehingga tidak sedikit pendapat yang menyatakan bahwa politik dapat terlepas dari etika. Pendapat ini seringkali disandarkan atas nama Machiavelli, yang di mana kecenderungan para politikus ini seringkali menyalahkan tokoh ini.

Di era modern, atau paling tidak belakangan ini, banyak politikus yang meyakini Machiavelli melakukan kesalahan besar. Machiavelli mengajukan konsep negara, yang harus menghindari perilaku terpuji (kejujuran, kebaikan,

---

<sup>49</sup> Satanly Bing, *Tujuan Menghalalkan Segala Cara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 18

kebijaksanaan, dll.). Berbeda dengan para pendahulunya, mereka selalu menuntut kejujuran, kebaikan dan kualitas terpuji lainnya dalam kehidupan negara.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, para ahli teori menyadari bahwa tujuan dari etika politik adalah untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang sehat antara penguasa dan rakyat. Dalam rangka memperluas ruang lingkup kebebasan dan mewujudkan birokrasi yang berkeadilan, masyarakat harus mampu menjadi panutan untuk bekerja keras meningkatkan kesejahteraan rakyat, hidup bersama, dan berkarya untuk kesejahteraan sesama.<sup>51</sup>

Dari definisi etika politik di atas, ada baiknya untuk menganalisis korelasi antara perilaku individu, perilaku kolektif dan birokrasi pemerintah. Penekanan pada relevansi ini mencegah pemahaman etika politik direduksi menjadi etika pribadi dari perilaku individu dalam bernegara.

Menurut Paul Ricour, konsep etika politik mengandung tiga syarat. Pertama, cobalah hidup dengan dan dengan orang lain. Kedua, berjuang untuk memperluas ruang lingkup kebebasan. Ketiga, bangun sistem yang adil. Ketiga persyaratan ini saling terkait. “Hidup untuk sesama dan hidup bersama”, kecuali kita menerima keberagaman dalam kerangka sistem yang adil, semua ini tidak mungkin. Kehidupan yang baik hanyalah cita-cita kebebasan, kesempurnaan kelangsungan hidup dan realisasi kebajikan<sup>52</sup>

Kebebasan dicapai dengan mencegah warga atau kelompok saling merugikan; sebaliknya, kebebasan sipil mendorong orang untuk mengambil

---

<sup>50</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 25.

<sup>51</sup> Widjaja, *Etika Pemerintahan*, 10.

<sup>52</sup> Hendra, *Filsafat Demokrasi*, 25.

inisiatif dan mengkritik sistem yang tidak adil. Definisi terakhir kebebasan adalah legitimasi fisik, sosial, dan politik yang diperlukan untuk pelaksanaan kebebasan tertentu.<sup>53</sup> Oleh karena itu dalam pengertian kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat, dan lain-lain, dapat disebut sebagai kebebasan demokratis, dan telah menjadi aturan khusus suatu negara.

Etika politik yang sehat bisa mendorong demokrasi dan kebebasan. Namun, tidak sesuai jika etika hanya diterapkan dalam konteks negara yang mengharuskan penguasa untuk tegas. Tidak dapat dipungkiri bahwa Plato sendiri menyatakan tidak percaya pada demokrasi, karena menurutnya, hancurnya sistem demokrasi di Athena yang menyebabkan munculnya sistem perwakilan, yaitu kekacauan politik, dan banyak orang merebut kekuasaan.<sup>54</sup>

Pakar Politik Barat, Easton mengatakan, strategi politik yang dijalankan oleh otoritas harus tepat dan akurat sehingga dapat diterapkan dengan baik dalam prakteknya. Dia juga berpendapat: “Tidak ada alasan bagi ilmuwan politik untuk membatasi diri pada tugas memahami hubungan politik tanpa mempertanyakan hubungan politik lama atau membangun kompleks politik baru.”<sup>55</sup>

Wujud etika dalam suatu negara dapat dilihat pada ketentraman, kesejahteraan dan keamanan warganya, yang semuanya diwujudkan dalam strategi politik yang dianut oleh penguasa. Karena pada akhirnya rakyat hanya akan mempertimbangkan hasil akhir yang akan mengarah pada pencapaian

---

<sup>53</sup> Ibid., 20.

<sup>54</sup> Carlton. Dkk, *Pengantar*, 51.

<sup>55</sup> S. P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 107-109.

penguasa.<sup>56</sup> Oleh karena itu, dari semua temuan ini ditemukan bahwa etika dan kekuasaan politik selalu terkait dalam kehidupan berbangsa, dan tugas penguasa adalah menjadikan keduanya hubungan yang baik dalam keadaan apa pun.



---

<sup>56</sup> Machiavelli, *The Prince*, 119.

### BAB III

#### Sejarah & Perkembangan Intelektual Ibnu Khaldun

##### A. Keluarga Besar dan Masa Kecil Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun bernama asli Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Khalid bin Usman bin Hani bin al Khathab bin Kuraib bin Ma'dikarib bin al-Harish bin Wail bin Hujr.<sup>57</sup> Di masa kecil Ibnu khaldun memiliki nama Abdurrahman kemudian biasa dipanggil dengan Abu Zaid sebagai nama panggilan. Abu Zaid sendiri merupakan nama anak terbesar Ibnu khaldun.<sup>58</sup> Nama lain seorang Ibnu Khaldun yaitu Waliyuddin sebagai nama gelar yang diberikan kepadanya sebagai suatu penghargaan ketika ia menjabat sebagai hakim agung di Mesir.<sup>59</sup> Seiring berjalannya waktu, ia lebih populer dengan panggilan Ibnu Khaldun<sup>60</sup>, pemberian nama ini sebagai wujud penghormatan yang diberikan kepada kakeknya yang kesembilan yaitu Khalid.<sup>61</sup>

Pada tanggal 27 Mei 1332 M Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, bertepatan dengan 1 Ramadan 732 H dan meninggal pada hari Jumat tanggal 19

<sup>57</sup>Muhammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun: His Life And Work*, (Delhi: New Taj Offset Press, 1979), 3.

<sup>58</sup> Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), 30.

<sup>59</sup> Ali Abdulwahid Wafi, *Ibn Khaldun: Riwayat dan Karyanya*, alih Bahasa Ahmadie Thaha, (Jakarta: Grafitiepers, 1985), 3.

<sup>60</sup> Adalah kebiasaan orang Andalusia dan Maroko pada waktu itu untuk menambahkan huruf wawu dan nun di belakang nama-nama orang terkemuka, sebagai tanda penghormatan. Misalnya Khalid menjadi Khaldun, Hamid menjadi Hamdun, Zaid Menjadi Zaidun dan sebagainya.

<sup>61</sup> Fathiyyah Hasan Sulaiman, *Pandangan Ibnu Khaldun Tentang Ilmu Dan Pendidikan*, alih bahasa HMD. Dahlan, (Bandung: Diponrgoro, 1987), 11.

Maret 1406 M atau bertepatan pada 25 Ramadan 808 H di Mesir.<sup>62</sup> Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad ibn Muhammad ibn Hassan ibn Jabiri ibn Muhhammad ibn Ibrahim ibn ‘Abd Al-Rahman ibn Khalid. Akan tetapi, Khalid leboh populer dengan nama Khaldun. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mempunyai nama lain yaitu Abu Zaid, nama yang dinisbatkan pada anaknya yang paling tua. Ibnu Khaldun juga mempunyai nama kehormatan yaitu Waliyuddin, sebuah nama penghormatan yang didapatkan di Mesir ketika menjadi Hakim.<sup>63</sup>

Masa hidup Ibn Khaldun berkisar pada kurun tahun 1332-1406 Masehi. Dalam hitungan tahun Hijriyah berkisar pada abad delapan sampai sembilan Hijriyah di masa pemerintahan kerajaan Bani Mamluk. Setelah Baghdad jatuh ke tangan Bangsa Tartar di sekitar tahun 654 H sampai 692 H, berdampak pada merosotnya perkembangan bahasa, sastra dan kebudayaan Arab. Hal ini yang kemudian mendorong banyak ulama dan sastrawan Baghdad bermigrasi ke Kairo, Mesir. Di saat yang bersamaan, dinasti-dinasti kecil Islam pecahan Dinasti Umayyah II di Andalusia satu per satu mulai berguguran dan jatuh ke tangan umat Kristen.<sup>64</sup>

Setelah Baghdad terguling dan telah dikuasai oleh bangsa Tartar, banyak penghuninya keluar dari Baghdad. Mereka meninggalkan negeri seribu satu malam itu dan berbarengan dengan para muslim Andalusia berhijrah ke Kairo. Rombongan-rombongan itu dipenuhi dengan para ulama, ilmuwan dan sastrawan. Pusat peradaban Islampun beralih ke Mesir. Bani Mamluk menyambut dengan

---

<sup>62</sup>Ibid., 12.

<sup>63</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, alih bahasa Masturi Irham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar:2017), 1079.

<sup>64</sup>Ibid., 1080.

baik para imigran tadi, dan karena itu mereka merasakan keamanan dan kenyamanan di bumi Piramida. Perlu dicatat, masa-masa abad 8 Hijriyah atau 14 M merupakan masa pergelokan secara politik seluruh dunia. Periode ini yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan di hampir seluruh dunia, terutama Eropa.

Di era ini menjadi momentum terjadinya pergulatan perubahan zaman yang signifikan. Dunia Arab mengalami transisi dan perubahan dari kejayaan ke arah perpecahan dan kemunduran, dan Eropa memulai era barunya dari keterbelakangan menuju ke arah kebangkitan. Hal ini bisa kita amati, bahwa di Afrika Utara kekacauan dan revolusi mulai meluas. Ini disebabkan adanya perpecahan-perpecahan di wilayah-wilayah kecil dan merebaknya fanatisme kelompok. Keadaan ini berimplikasi pada kebudayaan Arab yang bergerak ke arah kemunduran. Demikianlah gambaran sosial politik di masa Ibnu Khaldun.

Kakek Ibnu Khaldun, bernama Khalid ibn Utsman menetap di kota Carmonne bersama keluarganya dalam jangka waktu tertentu sebelum berpindah ke kota Sevilla. Di kota ini Ibnu Khaldun dan keluarganya dipercaya untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam urusan ilmu pengetahuan dan politik, diantaranya, yaitu Kuraib ibn Khaldun yang masyhur dalam bidang ilmu pengetahuan. Menurut hemat penulis, pamor Bani Khaldun di kota Sevilla sangat terhormat. Keluarga ini baru dikenal dan disebut-sebut setelah Daulah Muwahidin

lemah, kondisi di kota Andalus goncang, dan sebagian besar wilayah kota serta pelabuhannya dikuasai oleh Raja Castilia.<sup>65</sup>

Ketika kerajaan Muwahhidin hancur pada kisaran tahun 1200-an Masehi, banyak dari kota-kota besar seperti kota Sevilla, pelabuhan-pelabuhannya dikuasai oleh Kerajaan Castilia. Keluarga Ibnu Khaldun akhirnya bermigrasi ke Afrika Utara dan menetap di kota Bejaya.<sup>66</sup> Perpindahan ini juga dikarenakan seorang kakek Ibnu Khaldun yang bernama Muhammad bin Abu Bakar diangkat menjadi staf kesekretariatan negara.

Pada 711 H Daulah Muwahiddun sempat merebut kekuasaan Bani Hafshah termasuk kota Bejaya yang menjadi tempat tinggal kakek Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendekati Amir, Abu Yahya bin al-Lahyani, dan menjabat sebagai bendahara untuk sementara waktu, lalu melemparkan dirinya keluar dari kesibukan hidup. Namun, pengasingan ini tidak mengurangi kedudukan dan otoritasnya di negara tersebut. Dengan demikian, ia tetap dikenal sebagai pria pemberani hingga akhir hayatnya.

#### B. Masa Pendidikan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun merupakan sosok yang lahir dari keluarga Imuwan terpandang yang memiliki prestise di bidang ilmu pengetahuan dan pemerintahan. Dalam kondisi keluarga yang sedemikian rupa, Ibnu Khaldun tumbuh dan berkembang dalam dua kondisi yang menguntungkan. Pertama, hidup dalam lingkungan yang gemar belajar dan mencintai ilmu pengetahuan. Kedua, diliputi

---

<sup>65</sup>Fathiyyah Hasan , *Pandangan Ibnu Khaldun*, 12.

<sup>66</sup>Kota Bougie merupakan salah satu kota di Aljazair dan merupakan pusat Magrib bagian tengah.



dengan perihal pangkat dan jabatan kekuasaan. Ayahnya bernama Abbu Abdulah Muhamad merupakan seorang yang aktif dalam dunia politik, meski pada akhirnya memilih berhenti dari aktivitas politiknya dan kembali pada ketekunannya dalam dunia keilmuan serta hal-hal yang bersifat sufistik.<sup>67</sup>

Abu Abdullah Muhammad telah meninggalkan kehidupan politik yang dijadikan mata pencaharian oleh bapak dan kakeknya. Ayah Ibnu Khaldun ini tampak lebih mengutamakan ilmu dan dari kehidupan politik tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadikan Ayah Ibnu Khaldun berpaling dari kegiatan perang dan meninggalkan *ribath*<sup>68</sup>, kemudian giat membaca dan memperdalam ilmu.<sup>69</sup>

Ayah Ibnu Khaldun merupakan seorang yang terkemuka dalam pertukangan khas Arab, di samping mempunyai keahlian dalam bahasa dan sastra Arab khususnya bidang syair dan seni-seninya.<sup>70</sup> Abu Abdullah Muhammad meninggal dunia pada 749 H atau sekitar 1349 M karena musibah wabah pes yang terjadi di Afrika Utara. Kejadian ini menjadikan Ibnu Khaldun seorang anak yatim beserta empat saudaranya, yang pada waktu itu masih berusia 10 tahun.<sup>71</sup>

Dengan orientasi seorang ayah yang lebih mengedepankan kepada urusan ilmu dan peajaran, menjadikan Ibnu Khaldun dan juga adik-adiknya yang lain tidak menyimpang dari tradisi-tradisi yang berlaku di dalam keluarganya.

---

<sup>67</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 1082.

<sup>68</sup>*Ribath* dalam bahasa Arab pada asalnya berarti kamp; yaitu tempat tentara yang dibangun di perbatasan negeri untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Pada waktu itu Abu Abdullah Muhammad adalah seorang Perwira Militer. lihat Ahmad Syafii Maarif, *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 12.

<sup>69</sup>Fathiyyah Hasan, *Pandangan Ibnu Khaldun*, 13.

<sup>70</sup>At-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihaltuhu Syarqan wa Gharban, Lajnatut Ta'lif wat Tarjamah wan Nasyr, 14.

<sup>71</sup>Fathiyyah Hasan, *Pandangan Ibnu Khaldun*, 14.

Sejumlah anggota keluarga ini yang berada di Andalusia telah mendalami berbagai ilmu. Di antara mereka adalah Umar bin Khaldun yang mahir dalam bidang ilmu-ilmu eksakta, falak (astronomi) dan kedokteran. Dengan demikian, Bani Khaldun dikenal dengan kemahiran mereka dalam bidang politik dan ilmu sekaligus.

Pada masa pendidikannya, Ibnu Khaldun kecil belajar membaca dan menghafal kitab suci Al-Qur'an, selanjutnya dilanjutkan dengan menimba banyak ilmu dari kalangan syakh-syaikh yang masyhur sesuai dengan kapasitas bidang keilmuannya. Pada saat itu, Tunisia menjadi bagian dari sentralnya dan sastrawan besar. Ketika di tahun-tahun 740-an hijriyah, bagian kota-kota yang berada di wilayah timur dan barat negara ini, diserang wabah pes yang amat dahsyat, Hal ini mengakibatkan hilangnya kedua orang tua Ibnu Khaldun dan berdampak terhadap kelangsungan belajar ibn Khaldun Yang juga turut kehilangan sebagian gurunya, hingga akhirnya Ibnu Khaldun bermigrasi ke Magrib.<sup>72</sup>

Sepeninggal orang tuanya, yang pada saat itu Ibnu Khaldun masih remaja menjadi sisi tolak kehidupan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memulai kehidupan mandirinya dengan meninggalkan ketergantungannya terhadap keluarga dan kediamannya. Ibnu Khaldun melakukan pengembaraan ke Maroko, di sana Ibnu Khaldun berkelana dan mengawali kegiatan politiknya.

### C. **Guru-Guru Ibnu Khaldun**

---

<sup>72</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 1084.

Sebagaimana yang sudah dijabarkan di atas, keluarga besar Ibnu Khaldun berasal dari kalangan terhormat, sejak kecil dan dalam pertumbuhannya Ibnu Khaldun berada di lingkungan orang-orang yang tekun dalam belajar dan ilmu pengetahuan. ‘Abu Abdullah Muhammad ialah ayah sekaligus menjadi guru pertamanya. Kepadanyalah Ibnu Khaldun kecil belajar membaca dan menulis bahasa Arab.<sup>73</sup>

Di antara orang-orang yang dijadikan guru baginya ialah ‘Abu Abdulah Muhammad bin Saad bin Bural Al-Anshari, Al-Quran dan Qira’at adalah ilmu yang Ibnu Khaldun pelajari darinya.<sup>74</sup> ‘Abu Abdilah bin al-Arabi al-Hashayri dan ‘Abul Abbas Ahmad bin Qashar, Muhammad Al-Syawwasy Al-Zarzali, dari merekalah Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab. Abu ‘Abdillah Muhammad bin Bahr dan Abu ‘Abdillah bin Jabir al-Wadiyasi dalam ilmu sastra, Abu ‘Abdillah bin ‘Abdillah al-Jayyani dan Abu ‘Abdillah bin ‘Abd al-Salam untuk ilmu fikih. Abu Muhammad bin ‘Abdul Muhaimin al-Hadhrami dalam ilmu hadis, Abu al-‘Abbas Ahmad al-Zawawi dalam ilmu tafsir dan Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili dalam bidang ulum ‘aqliyyah, seperti filsafat, logika dan metafisika.<sup>75</sup> Selain nama-nama di atas, ada seorang guru yang memberikan pelajaran sebuah karya Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta’ yaitu Abdullah Muhammad bin Abdussalam.

Dilihat dengan banyaknya deretan nama-nama guru beliau dan juga multidimensional keilmuan yang Ibnu Khaldun pelajari, mengisyaratkan akan

---

<sup>73</sup> Suharto, *Epistemologi*, 36.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>75</sup> al-Ta’rif, 457-460.

keluasan ilmu Ibn Khaldun yang kuasai. Dengan ini Ibn Khaldun muda adalah sosok yang cerdas, otaknya berkapasitas luar biasa. Bukti ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldun adalah orang yang memiliki ambisi tinggi perihal keilmuan, yang selalu haus dan diliputi rasa ketidakpuasan terhadap suatu ilmu pengetahuan.<sup>76</sup> Pengetahuannya sangat luas dan sangat bervariasi, bahkan menurut Toynbee, Ibn Khaldun mendapatkan pendidikan yang matang meski bersifat skolastik namun mendalam dari tiap-tiap gurunya.<sup>77</sup>

Nama-nama seperti Muhammad Ibn Sullaiman Satti Abdul Muhaimini Hadramiy, Muhammad Ibn Ibrahimiy Abiliy, merupakan guru-guru termasyhurnya, beliau-belaulah yang berhasil turut membentuk pribadi seorang Ibn Khaldun. Kepada mereka, Ibn Khaldun mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang AlQuran dan Alhadits, selain itu juga belajar mengenai ilmu logika, ilmu kebijakan dan pengajaran.

Ibnu Khaldun meletakkan dua orang tersebut dari sekian banyak gurugurunya pada porsi yang istimewa. Pengetahuan tentang Ilmu bahasa, filsafat dan hukum Islam adalah hal yang Ibn Khaldun dapatkan atas pengaruh mereka. Dari Syeikh Muhammad Ibn Ibrahim Abiliy, Ibn Khaldun mendapatkan kematangan ilmu-ilmu filsafat, dari Syeikh ‘Abdul Muhhaimin Al-Hadramiy mendapatkan kematangan ilmu-ilmu agama, dengannya Ibn Khaldun belajar buku-buku hadits, *Al- Kutub Al-Sittah dan Al-Muwatta’*. Ketika memasuki usia yang ke 20, Ibn

---

<sup>76</sup> Suharto, *Epistemologi*, 38.

<sup>77</sup> Arnold J. Toynbee, *A study of History*, (New York: Columbia University Press, 1983), 322.

Khaldun telah berhasil menyelesaikan belajarnya dan mendapatkan kepercayaan dari mayoritas guru-gurunya untuk mengamalkan ilmunya dengan mengajar.

#### D. Corak Pemikiran dan Aktivitas Politik Ibn Khaldun.

Sebagai seorang pemikir, Ibn Khaldun merupakan hasil dari sebuah sejarah.<sup>78</sup> Karenanya, agar bisa mempelajarinya dan membaca corak pemikirannya, perlulah secara simultan untuk dapat mengetahui aspek sosial historis yang meliputi kehidupannya. Sebagai hal yang penting mengenai Ibn Khaldun dan pemikirannya, adalah tidak terpisahnya pemikiran keislamannya pada setiap corak-corak pemikirannya. Hal inilah yang kemudian menjadi ciri khas pada setiap pandangan-pandangannya terhadap agama, sosial, politik maupun budaya. Bahkan dalam satu kesempatan, Iqbal pernah mengatakan bahwa apa yang ada dalam kitab *Muqaddimah* merupakan hasil dari manifestasi pemikikiran Ibn Khaldun yang diilhami dari AlQuran sebagai sumber utama dalam ajaran Islam.<sup>79</sup>

Ibn Khaldun dengan segala kondisi sosial yang mendukungnya, dan berkat bakat kecerdasannya, menjadikan ia sebagai seorang filosof Muslim. Pijakan-pijakan pikirannya yang ditekankan pada logika, menghasilkan sebuah pemikiran yang sangatlah rasional.<sup>80</sup> Sangatlah dimungkinkan ketika Ibn Khaldun mempunyai pemikiran yang sedemikian rupa, sebagai buah dari hasil belajarnya

<sup>78</sup> Vincent Monteil, "Ibn Khaldun: Pembina Kritik Sejarah dan Perintis Sosiologi Modern Pada Abad XIV", dalam Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* Ibnu Khaldun: Suatu Pendahuluan, alih bahasa Ismail Yakub (Jakarta: Faizan, 1982), 5.

<sup>79</sup> Muhammad Iqbal, *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, alih bahasa Ali Audah dkk, (Jakarta: Tintamas, 1966), 151.

<sup>80</sup> Ali Audah, *Dari Khazanah Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 59.

mengenai filsafat. Dimana tokoh-tokoh filosof terdahulu telah mempengaruhi gaya berfikir filsafatnya.

Banyak tokoh-tokoh filosof yang mempengaruhi pemikiran filsafat Ibn Khaldun, diantaranya yang paling dominan ialah imam Ghazali (w. 1111 M). Akan tetapi, dalam beberapa hal, antara Ibn Khaldun dan Ghazali terdapat perbedaan dalam cara pandang. Dalam sebuah kasus seperti mengenai logika, dimana Ibn Khaldun memandang logika adalah suatu alat yang dapat dijadikan latihan seseorang untuk berfikir sistematis, dibuktikan dengan pikiran-pikirannya yang logis realistis, sedangkan Ghazali menentang keras mengenai pemikiran logika, karena menurutnya sukar untuk mengandalkan hasil dari pemikiran logika.<sup>81</sup>

Dalam perihal lain, sosok Ibn Khaldun juga merupakan seorang empirik.<sup>82</sup> Empirisme dalam pemikiran Ibn Khaldun dapat dilihat dari kemampuannya dalam memadukan cara berfikir deduksi dan induksi pada pengetahuan Islam. Sebagai seorang ilmuwan, Ibn Khaldun berhasil membuat pemikiran sintesis antara aliran Rasionalisme dengan aliran Empirisme. Berkat kelesaiannya inilah yang kemudian menjadikan Ibn Khaldun dipercaya untuk menjabat jabatan dalam pemerintahan sekaligus menjadi aktor dalam politik praktis.

Ketika bermukim di Tunis pada kisaran tahun 750 an Hijriyah, Ibnu Khaldun rajin belajar dan membaca, serta menghadiri majelis-majelis keilmuan.

---

<sup>81</sup> Ibid., 47-48.

<sup>82</sup> Andi Hakim Nasoetion, *Pengantar ke Filsafat Sains*, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1999), 55.

Disaat Ibn Khaldun berumur 20 tahun, beliau sudah mulai dikenal oleh kalangan penguasa negeri Tunis, Pada saat itu, Abu Muhamad ibn Tarafkin sebagai penguasa Tunis memanggil Ibn Khaldun ke kerajaan untuk menjadikannya seorang sekretaris, dan Ibn Khaldun diangkat sebagai sekretaris Sultan Abu Ishaq Ibn Yahya Al-Hafsi. Tawaran tersebut diterimanya dan sekaligus menjadi pengalaman pertama dalam urusan jabatan.<sup>83</sup>

Awal inilah yang kemudian menjadi bagian dari tradisi yang secara turun temurun mewarisi keluarga besar Ibn Khaldun dan nenek moyangnya dalam keterlebitan dengan urusan negara dan pemerintah, hingga memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi. Penerimaan Ibn Khaldun terhadap sebuah jabatan yang ia terima juga dikarenakan , pada waktu itu sukar keadaannya untuk bisa belajar kembali, banyak gurunya yang berpindah dan Ibn Khaldun tidak bisa mengikutinya.

Jabatan sebagai sekretaris Sultan Abu Ishaq ibn Abu Yahya Al-Hafsi ia Jalani kurang lebih selama lima tahun. Hingga akhirnya Ibn Khaldun berpindah ke kota Fez, Maroko di tahun 1354 Masehi. Perpindahan Ibn Khaldun ke kota Fez didasari dengan adanya panggilan Abu Inan sebagai penguasa Maghrib yang telah menggantikan Abu Hasan sebagai penguasa Maroko sebelumnya yang telah meninggal tiga tahun sebelum kedatangan Ibn Khaldun di Fez. Abu Inan sebagai penguasa baru, menginginkan Ibn Khaldun untuk menjadi salah seorang sekretaris sultan dan menjadi anggota dari departemen keilmuan. Momen inilah yang

---

<sup>83</sup> A. Mukti Ali, *Ibn Chaldun dan Asal-Usul Sosiologi*, (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970), 17.

menjadikan Ibn Khaldun semakin kuat dan yakin untuk masuk dalam dunia politik praktis.

Selama tinggal di Fez, selain menjadi seorang anggota departemen keilmuan dan seorang sekretaris sultan, Ibn Khaldun juga meneruskan aktivitas yang menjadi kegemarannya. Di kota ini Ibn Khaldun sebagai seorang yang cinta ilmu dan pengetahuan, menggunakan waktu luangnya untuk belajar dan berguru, ia rajin berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan di Kota Fez, dan juga mengunjungi sastrawan-sastrawan kenamaan di kota ini untuk berguru.

Perjalanan Ibn Khaldun di Fez, tidak selamanya mulus. Selang beberapa tahun setelah ia menjadi seorang sekretaris sultan, Ibn Khaldun Mendapat cobaan dengan adanya sangkaan ia telah melakukan perbuatan buruk sabotase terhadap Abu Inan. Ia dimasukkan penjara pada tahun 758 Hijriyah, namun selang dua tahun kemudian Ibn Khaldun dibebaskan, ketika itu penguasa Maroko telah digantikan oleh Anak Abu Hasan yaitu Abu Salim. Dengannya Ibn Khaldun dijadikan seorang sekretaris pribadi untuk dirinya.

Setelah merasa cukup dengan apa yang di tekuni dan telah diambil manfaat dari ilmu dan pengalaman selama di Fez, Ibn Khaldun kembali berpindah ke Granada, Andalusia. Pertimbangan Ibn Khaldun melakukan pindah juga didasari atas dorongan kondisi Afrika Utara secara politik sudah tidak menguntungkan lagi. Selain ingin melanjutkan pengembaraannya, Ibn Khaldun memlih granada sebagai tempat tujuan berikutnya dikarenakan penguasa granada yang bernama Abu Abdullah dan Lisan Ad-Din al-katib merupakan teman sepengungsian di Fez, di Istana Abu Salim.



Kedekatan dan hubungan yang baik antar mereka, berimplikasi terhadap sikap Abu Abdullah dan Lisan Ad-Din ketika mengetahui Ibn Khaldun bermigran ke Granada, Mereka menyambutnya dengan penuh hangat dan senang. Ibn Khaldun mendapatkan pelayanan yang istimewa, dan diberi tempat tinggal yang mewah sebagai wujud balas budi atas apa yang telah dilakukannya kepada Abu Abdullah dan Menterinya Lisan Ad-Din ketika di Fez.

Setelah menetap di Granada dan bekerja untuk Sultan Abu Abdullah, Ibn Khaldun menjadi seorang diplomat kerajaan. Ibn Khaldun terkenal dengan kebaikan dan kebijaksanaanya, Hingga akhirnya di tahun 765 H, ia ditugaskan oleh sang sultan untuk mewakili kerajaan sebagai negosiator dalam sebuah perjanjian damai dengan kerajaan Castilia. Selain terkenal cerdas, Ibn Khaldun juga merupakan orang yang cakap dalam berdiplomasi, sehingga tugas yang diberikan oleh Sultan Abu Abdullah ini berhasil ia selesaikan.

Perjalanan tidak selamanya dan terus dalam kesenangan, keberhasilan Ibn Khaldun dalam urusan diplomasi kepada raja Castilia, mengundang ketidaksukaan orang banyak pada dirinya, Ibn Khaldun diadu domba dengan seorang kawannya sendiri Lisan Ad-Din yang menjadi menteri raja Abu Abdullah. Namun sebelum konflik berkepanjangan, Ibn Khaldun memilih untuk keluar dari Granada dan meninggalkan Andalusia menuju Bejaya untuk lebih fokus menimba ilmu dan memperdalamnya.

#### E. **Karya-Karya Ibn Khaldun**

Sebagai Seorang Ilmuwan yang kenamaan dan Masyhur, Sudah semestinya Ibn Khaldun tidak bisa dilepaskan dari kontribusi-kontribusi yang dihasilkannya baik yang berupa karya tulis ataupun yang lain. Yang menjadi salah satu sebab kemasyhuran Ibnu Khaldun ialah sebuah karyanya yang mendunia, Yaitu *Muqaddimah*, sebuah karya dalam bentuk kitab yang menjadi bagian pembuka dari sederet banyaknya pemikiran dan karyanya. Kitab *Muqaddimah* ini berisikan kumpulan sejarah-sejarah bangsa arab masa lampau, sejarah sosial dan juga termuat teori-teori sosial dan politik. Selain *Muqaddimah* yang menjadi induk dari semua hasil karya-karyanya, juga terdapat karya-karya lain diantaranya :

1. *Kitab Al- 'Ibar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar fi Ayyam Al- 'Arab wa Al- 'Ajam wa Al-Barbar wa man Asharuhum min dzawi Ash-Shulthani Al- 'Akbar*  
Kitab ini berisikan sejarah-sejarah bangsa-bangsa (kabilah) Arab dan non Arab, Barbar. Kitab ini terdiri dari tiga buku, dengan masing-masing setiap jilidnya menjadi rangkaian kesatuan. Buku pertama sekaligus menjadi jilid pertama dalam kitab ini yaitu sebagai pembuka, memuat berbagai kisah-kisah mengenai masyarakat dan ciri-cirinya, tentang kehidupan, pencaharian, pemerintahan, kekuasaan dan ilmu pengetahuan.

Bagian kedua dari kitab ini terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Disamping itu juga mengandung ulasan-ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan

mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa). Kemudian buku ketiga terdiri dari dua jilid yaitu: jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi (Afrika Utara).

2. Kitab *At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban* atau disebut secara ringkas dengan istilah *at-Ta'rif*, dan oleh orang-orang Barat disebut dengan otobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab *Al-'Ibar* yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis otobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab, tetapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### Kekuasaan dan Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun

#### A. **Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kekuasaan**

##### 1. **Interpretasi Kekuasaan Politik Ibnu Khaldun**

Istilah kekuasaan Politik seringkali digunakan untuk menunjukkan otoritas masyarakat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Definisi ini mengacu pada konsep politik sebagai kegiatan yang mengatur masyarakat. Politik mencakup kekuasaan untuk merumuskan aturan hukum (kekuasaan legislatif), kekuasaan untuk menjalankan hukum (eksekutif), kekuasaan untuk melaksanakan perlindungan yudisial terhadap hukum (yudikatif), dan kekuasaan untuk mengatur hukum lainnya.

Sedangkan dalam istilah Al-Qur'an, konsepsi kekuasaan politik dapat dipahami melalui ayat-ayat al-Qur'an. Dengan objek ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan kekuasaan politik diharapkan dapat mengetahui konsep dan pemikiran politik yang Qurani, yang bisa dijadikan rujukan bagi umat Islam. Ada beberapa kata dalam Alquran yang bisa dijadikan kata kunci yang berkaitan dengan konsep kekuasaan. Kata-kata ini termasuk *al-hukm*, *as-sulthan* dan *al-mulk* yang akan dijelaskan sebagai berikut::

a. Konsep al-Hukm, secara etimologi al-hukm artinya membuat keputusan, berasal dari kata dengan huruf ha,kaf, dan mim. Istilah hukum mengacu pada konsep politik, suatu kegiatan berdasarkan hukum Tuhan, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Namun, jika makna hukum berkaitan dengan kehidupan masyarakat, maka istilah tersebut berarti membuat kebijakan

atau melaksanakannya sebagai tatanan masyarakat. Pengertian ini dapat dilihat dalam Q.S al-Qalam ayat 36-39.<sup>84</sup>

Oleh karena itu, istilah “al-hukm” tidak hanya berdasarkan hukum Tuhan, tetapi juga hukum manusia. Artinya ada dua hukum, hukum Tuhan dan hukum manusia. Berdasarkan pengertian di atas, barangkali dapat kita temukan hubungan antara kata “al-hukm” dengan konsep politik yang dikemukakan, sehingga kata tersebut juga berkaitan dengan kekuatan politik.

b. *as-Sulthan*, kata ini mempunyai akar kata yang berasal dari huruf sin, lam, dan tha dan mempunyai makna pokok “kekuatan dan paksaan”. Kata Sulthan memiliki arti bahwa kekuasaan ada dalam ayat 33 dan 80 QS Al-Isra, yaitu: “setiap orang yang dianiaya dan dibunuh, sesungguhnya kami berikan kepadanya” (QS Al-Isra : 33) Dan "mewarisi dariku" -kekuatanmu membantu "(QS Al-Isra: 80). Dari penggunaan kata sulthan di atas, kita dapat melihat kata Memiliki makna sosiologis karena berkaitan dengan kemampuan untuk mengatasi orang lain, oleh karena itu jika dikaitkan dengan konsep kekuasaan politik maka jelaslah kata tersebut berkaitan dengan konsep kemampuan, daripada konsep kewenangan.

c. *al-Mulk*, kata ini mengandung arti utama dari efektifitas dan kemampuan. Dari arti pertama terbentuk kata kerja malak-yamliku-milkan yang artinya

---

<sup>84</sup> Al-Qur'an dan terjemahan surah al-Qalam ayat 36-39:

36. Atau adakah kamu (berbuat demikian); bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

37. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?

38. Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.

39. Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?

memiliki, dan dari arti kedua terbentuk kata kerja malak-yamliku-mulkan yang artinya memerintah, dan dari sini kita mendapatkan kata malik "raja" dan mulk "kekuasaan". Hal ini dapat dilihat dalam Q.S al-Baqarah : 247.<sup>85</sup>

Istilah al-mulk adalah kepala negara, mewarisi jabatan kepala negara sebelumnya. Maksud dari penjelasan ini adalah bahwa konsep yang terkandung dalam kata al-mulk merupakan konsep umum dengan ruang lingkup kepemilikan. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa kekuatan politik adalah kekuatan yang dimiliki oleh manusia, dan merupakan pemberian yang diberikan kepada Tuhan oleh kekuatan lain.

Pemikiran Ibn Khaldun tentang kekuasaan dan negara diilhami oleh penelitian Ibn Khaldun. Alasan penelitian ini menjadi lebih luas adalah karena penelitiannya Konsep umum manusia Ibn Khaldun tentang sosiologi (perilaku manusia dan peradaban sebagai proses perubahan sosial). Syarifuddin Jurdi menjelaskan bahwa konsep kekuasaan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa kekuasaan merupakan bagian penting dari masyarakat. Kekuasaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari kehidupan bernegara.<sup>86</sup> Konsep dasar ilmiah perlu

---

<sup>85</sup> Q.S al-Baqarah: 247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" nabi (mereka) berkata : "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerhinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-NYA. Dan Allah Maha luas pemberian-NYA lagi maha mengetahui. Lihat Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah (Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

<sup>86</sup> Syarifuddin Jurdi, *Awal Mula Sosiologi Modern (Kerangka Epistemologi, Metodologi, Dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun)*, (Jakarta: Kreasi Wacana, 2012), 104.

didalami agar mampu memahami pembangkitan dan perkembangan kekuasaan dalam dinamika kehidupan sosial suatu negara.

Ibnu Khaldun (Ibnu Khaldun) menulis dalam buku “Mukaddimah” bahwa sejarah peradaban bangsa menunjukkan bahwa manusia memiliki ciri-ciri alam yang unik, yaitu mampu bertahan hidup, mencari makan, menghindari binatang buas untuk terus hidup dan hidup. Kehidupan yang lebih layak dan ekspresif bekerjasama dengan manusia lain, karena tanpa bantuan orang lain, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Dengan cara ini, manusia disebut makhluk sosial.

Setelah peradaban tercipta, manusia membutuhkan seseorang yang dapat memerintah dan memimpinnya. Memiliki kekuatan dan otoritas untuk mematuhi pemimpin mereka. Dari sinilah kekuasaan lahir, dan legitimasi formal diperlukan untuk mendorong kendali atas tujuan-tujuan yang bercita-cita. Ibn Khaldun (Ibn Khaldun) selalu menentang hal-hal alam, melihat manusia dari fitrahnya.

Kehidupan di gurun adalah sumber keberanian. Tidak diragukan lagi bahwa kelompok liar lebih berani dari kelompok lain. Karena itu, mereka lebih mampu menggenggam semua kekuasaan di tangan negara lain. Ciri dan kondisi mereka dipengaruhi oleh lingkungannya, begitu mereka tinggal di daerah yang penuh dengan vegetasi yang subur dan berubah dari kehidupan miskin menjadi hidup mewah, keberanian mereka akan berkurang seiring dengan berkurangnya sifat liar dan kebiadaban mereka.

Begitu halnya dengan binatang, jika mereka hidup bersama manusia dan dijinakkan, keliaran dan keganasan mereka secara bertahap akan hilang. Manusia juga menjadi fleksibel dalam karakter dan sikap. Bergaul satu sama lain, berteman dan berteman adalah karakter mereka. Segala bentuk keakraban sudah menjadi fitrah manusia. Jika demikian, maka akan muncul pihak yang memimpin atau mengendalikan. Penguasa memiliki keberanian dan kekerasan yang umumnya dimiliki oleh orang-orang gurun. Lingkungan keluarga mereka membuat mereka lebih cenderung menjadi penguasa daripada faksi lain.

Ibn Khaldun percaya bahwa manusia adalah ciptaan politik. Manusia diberi alasan untuk berpikir dan membimbing hal-hal yang baik. Kecerdasan merupakan alat khusus yang tidak dapat diperoleh manusia, seperti hewan dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, kekuatan politik adalah kodrat manusiawi dan harus dilaksanakan apapun bentuknya.

Kedaulatan dan kekuasaan politik adalah milik manusia, karena keduanya merupakan salah satu ciri pembeda antara manusia dan hewan. Orang dengan perilaku efektif dan baik dapat mewujudkan kedaulatan politik, dan kebijaksanaan manusia dapat mengarah pada kekuasaan.<sup>87</sup> Dalam hal ini, kekuasaan identik dengan hal-hal yang baik, karena kejahatan tidak akan pernah menciptakan kekuatan untuk kejahatan itu sendiri. Kejahatan hanyalah merusak kekuasaan, dan kekuasaan adalah jaminan Tuhan bagi umat manusia dan wakil dari pelaksanaan hukum Tuhan.

---

<sup>87</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah Terj. Ahmadie Thoha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 171.



Untuk menjelaskan kekuatan pemikiran Ibnu Khaldun, yang perlu kita pahami adalah solidaritas sosial, yang merupakan wujud kemanusiaan yang alami yang diberikan oleh Allah SWT. Fenomena alam gaya berpikir Ibnu Khaldun tampaknya menjadi epistemologi yang dominan dalam mendeskripsikan konsep kekuasaan.

Ibn Khaldun meyakini bahwa kekuasaan dibentuk oleh kelompok tertentu untuk mengatasi kelompok lain (berkembang). Kekuasaan adalah kedudukan yang menyenangkan, termasuk maddi dan bermakna, material dan spiritual, oleh karena itu untuk memperoleh kekuasaan harus bertumpu pada prestise untuk memperoleh kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan sesuatu yang dapat dengan bebas bersaing secara kolektif maupun individu.

Dalam hubungan antara penguasa dan kekuasaan, penguasa sangat penting untuk hidup berdampingan dalam sebuah negara. Tanpa adanya penguasa, masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan, anarki, dan akhirnya mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Ibn Khaldun menunjukkan bahwa kepentingan orang-orang di kalangan penguasa bukan pada dirinya dan tubuhnya, seperti bentuk tubuhnya, luasnya ilmu, keindahan tulisannya dan ketajaman otaknya. Kebutuhan mereka terletak pada hubungannya dengan mereka. Oleh karena itu, kekuasaan dan penguasa adalah hubungan yang seimbang antara kedua pihak, penguasa memiliki rakyat, dan rakyat memiliki penguasa.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 102.

Penguasa di sini adalah orang-orang yang dipercaya oleh rakyat, membimbing dan merawat mereka dalam kehidupan bersama. Hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sekarang disebut hubungan demokratis.

Menurut Ibn Khaldun (Ibn Khaldun), kualitas penguasa sangat bergantung pada bagaimana dia memimpinnya. Cara yang sulit, hukuman atau cara yang lebih lembut. Penguasa adalah orang dengan tekanan yang sama, tetapi tidak dapat digunakan secara berlebihan dan merasa sombong. Ibn Khaldun tampaknya mengikuti Hadis, mengatakan “bertindak menurut yang terlemah di antara kamu.”<sup>89</sup> Sedangkan menurut Ibnu Khaldun ada beberapa jenis kekuasaan yaitu siyaasah thaabi'iyah (kedaulatan alam yang muncul di masyarakat), siyasah aqliyyah (kekuasaan yang dirancang oleh orang-orang pintar), siyasah diniyyah (negara hukum).

## 2. **Implementasi Kekuasaan dalam Politik**

Maju mundurnya Islam dalam sejarah menguraikan bagaimana sejarah Islam menjadi gerakan politik dunia. Sejarah Islam dibedakan menjadi tiga periode utama, yaitu periode klasik, periode abad pertengahan, dan periode modern. Periode klasik (650-1250 M) merupakan era progresif yang dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pemekaran, integrasi, dan puncak kejayaan (650-1000 M). Selama periode ini, wilayah Islam meluas ke Persia, India, Afrika Utara, dan Spanyol.

---

<sup>89</sup> Ibid., 103.

Daerah-daerah ini berada di bawah kekuasaan Islam, dan pusatnya bergantian dari Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Era ini adalah masa keemasan Islam. Ada banyak cendekiawan dan ilmuwan hebat di Dinasti Islam. Seperti Umayyah dan Abbasiyah menghasilkan ahli ilmiah, seperti 4 imam mazhab (Abu Hanifa, Ali Malik, Syafi'i dan Ahmad) dan filsuf seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, dll. Setelah kemenangan, umat Islam mengalami fase disintegrasi sepanjang 1000-1250. Pada tahun 1258, Hulagu Khan melakukan ekspansi ke daerah Abbasiyah untuk menghancurkan Baghdad dan memperburuk situasi.

Periode pertengahan (1250-1800 M) juga dibagi menjadi dua tahap, yaitu: tahap kemunduran era ini (1250-1500 M), dimana desentralisasi dan disintegrasi kekuasaan semakin besar. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan antara Arab dan Persia bahkan lebih menonjol. Dunia Islam terbagi menjadi dua wilayah, wilayah Arab terdiri dari Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesir dan Afrika Utara, dengan Mesir sebagai pusatnya. Wilayah Persia meliputi Balkan, Asia Kecil, Persia dan Asia Tengah, dengan Iran sebagai pusatnya. Selain itu, tahap kedua adalah pemerintahan tiga kerajaan utama (1500-1800 M), yang dimulai di era kemajuan dan kemunduran. Tiga kerajaan utama yang dimaksud adalah Kekaisaran Ottoman di Turki, Kerajaan Safawi di Persia dan Kekaisaran Mughal di India.

Dengan runtuhnya tiga kerajaan besar tersebut semakin memperparah kemunduran Islam. Umat Nabi Muhammad saw menjadi beku tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga sampai pada periode ketiga yaitu periode modern (1800-

seterusnya).<sup>90</sup> Islam kemudian berusaha bangkit dengan beberapa pembaharuan pemikiran yang berawal dari tokoh-tokoh Turki Utsmani.

Kita dapat mempelajari penerapan Islam dalam kekuasaan politik menurut sejarah tiga tahap, dan mencari bentuk penerapan kekuasaan politik dalam politik kontemporer. Praktik kekuasaan sepanjang sejarah Muslim setelah Nabi Muhammad penuh dengan perdebatan tentang bagaimana politik bekerja. Hal ini menyebabkan penyebutan Islam dalam politik dan pemerintahan pada periode kenabian pemikiran modern.

Umat Muslim telah melihat beberapa pemerintahan dinasti dalam sejarah mereka, dimana mereka tidak kebal dari kekacauan dan perebutan kekuasaan politik. Akibatnya, hasil logis dari hal ini adalah sejarah mencatat perkembangan umat Islam dan ide-idenya, dan mengusulkan konsep politik yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan metode yang digunakan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Islam tidak membutuhkan sistem politik seperti yang dipahami umat Islam. Satu pandangan adalah bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang utusan (rasul). Nabi berkomitmen pada agama dari perspektif yang murni, tanpa kecenderungan mengarah pada kekuasaan sementara, karena Nabi tidak pernah mengajukan perspektif atau memerintahkan atas nama pemerintah tertentu.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah pemikiran dan Gerakan)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 13-14.

<sup>91</sup> Ali Abdul Rasiq, *Khilafah Dan Dasar-Dasar Kekuasaan dalam John J. Donohue dan John L. Esposito. Islam in Transition: Muslim Perspectives (Terj. Machnun Husein. Kata Pengantar, M. Amien Rais, Islam dan Pembaharuan: ensiklopedi masalah-masalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 41-42.

Keyakinan kepada Allah, sebagai sumber segala sesuatu termasuk kekuasaan, adalah prinsip utama yang dibutuhkan untuk mendirikan masyarakat, negara, dan bentuk pemerintahan Islam.

Umat Islam bisa saling bekerjasama untuk melahirkan pemimpin di kalangan umat Islam atas dasar ajaran Islam, Ibnu Khaldun percaya bahwa agama akan membimbing pemimpin agar tidak berbuat salah. Inilah kekuatan yang diharapkan Ibnu Khaldun yaitu kekuatan untuk melindungi kelompok, memberikan kesejahteraan, rasa aman, dan menegakkan agama. Selain menggunakan agama sebagai dasar pembinaan nilai-nilai pemimpin, agama juga menjadi penghambat pembentukan persatuan kelompok dalam nilai-nilai yang dikandungnya.

Dalam konsep Islam (pemimpin atau penguasa), kepala negara yang mengontrol imam (sebagai kepala negara) memiliki tiga istilah umum, yaitu imamah, khalifah, dan amirul mukminin. Masing-masing gelar ini memiliki perkembangannya sendiri dan mengungkapkan makna tertentu:

- a. Imam, adalah seseorang yang harus diikuti, baik sebagai kepala negara atau bukan, yang bergerak dalam pekerjaan, Al-Qur'an, nabi, khalifah, panglima tentara dan sesuatu yang dipelajari anak-anak setiap hari, yang menjadi perumpamaan, dalil dan panduan. Dalam Al- Alquran, Imam digunakan tidak hanya untuk menunjukkan arah kebajikan. Namun ada pemimpin yang justru

mengarah pada kejahatan. Seperti tercantum dalam surah al-Qashash ayat 41<sup>92</sup> dan surat at-Taubah ayat 12.<sup>93</sup>

- b. Khalifah, merupakan legitimasi terhadap kepemimpinan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Khalifah menjadi gelar resmi bagi pemegang khilafah (pemerintahan), pada masa-masa Khulafaur Rasyidin namun kemudian akibat terlalu banyaknya permasalahan yang muncul dalam fase tersebut sehingga khalifah menjadi hilang dalam istilah dunia pemerintahan Islam seiring dengan kemunduran yang terjadi di dunia Islam itu sendiri.
- c. Amirul mukminin, gelar yang diberikan atas kepemimpinan Umar bin Khattab, yang kemudian Ibn Khaldun berkata: "Amirul mukminin adalah gelar khalifah. Gelar baru yang diadakan semenjak zaman khilafah yang dahulunya dinamakan komandan-komandan pasukan dengan gelar Amir."<sup>94</sup>

Sosiolog setuju bahwa inti dari menggunakan kekuasaan adalah fokus, bukan simbol kekuasaan. Kalaupun, misalnya, kekuasaan dalam bentuk khalifah, imamah atau sultan, jika tidak menerapkan prinsip-prinsip umum seperti tidak dapat diandalkan dan tidak adil, tidak ada makna simbol-simbol agama.<sup>95</sup> Tetapi istilah-istilah ini tidak mudah untuk dihapus. Oleh karena itu, Ibn Khaldun mengimplikasikan bahwa simbol-simbol tersebut harus ditafsirkan dari perspektif

<sup>92</sup> Q.S Al-qasas: 41. Terjemahan: "dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat pula mereka tidak akan ditolong".

<sup>93</sup> Q.S At-taubah: 12. Terjemahan; " dan jika mereka melanggar sumpah setelah perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan merka berhenti".

<sup>94</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam Dan Politik Bernegara*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2002), 36-40.

<sup>95</sup> Jurdi, *Awal Mula*, 159.

sosial. Perdebatan tentang simbol bahkan dapat membuat marah persatuan umat Islam. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun dapat memberikan kemampuan yang lebih untuk menggunakan kekuatan yang terkandung dalam nilai-nilai agama.

Di zaman modern, Islam secara politik tidak dapat memulihkan kejayaan zaman keemasannya, tetapi kekuatan Islam dapat bangkit kapan saja dan dapat mengancam kekuasaan yang sudah mapan. Secara politis, berbagai cara untuk menekan kebangkitan Islam dari sisi berlawanan terus bermunculan. Oleh karena itu, para pemikir Islam modern seperti al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, Husain Haikal, al-Maududi telah menjadi gerakan kebangkitan dunia bagi tokoh dan organisasi kekinian. Islam ditemukan dalam pendidikan dan berbagai bidang keilmuan lainnya.

Gagasan Ibn Khaldun telah berkontribusi dalam memecahkan perkembangan dunia Islam, meskipun ia hidup di Abad Pertengahan, ia telah menjadi seorang realis kontemporer. Kajian sejarah dan sosiologi sangat cocok untuk membangun sistem sosial dan membentuk sistem sosial Islam dalam kehidupan politik. Konsep "Ashabiyah" Ibn Khaldun membutuhkan pembentukan otoritas formal dan legitimasi politik. Dengan demikian akhlak dan nilai moral dapat diwujudkan sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan politik.

#### B. **Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Etika Politik**

Ibn Khaldun mengedepankan ide-ide politik yang secara garis besar dibagi menjadi negara (dalam hal pendirian dan bentuk pemerintahan) dan ide-ide para pemimpin atau kepala negara. Namun, yang terpenting dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun bukanlah bentuk negara, tetapi bagaimana negara beroperasi secara

religius dan moral yang adil dan jujur untuk memastikan perkembangan normal dan moral semua bidang kehidupan masyarakat. Apapun itu, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep kenegaraan yang dipahami oleh Ibnu Khaldun adalah konsep negara Islam, dan doktrin ruh Islam diikuti ketika menerapkan hukum yang berlaku.<sup>96</sup>

Sebagaimana telah disinggung di atas tentang bagaimana Ibnu Khaldun memandang kekuasaan yang harus dijalankan dalam ranah politik, kekuasaan dan politik adalah tanggung jawab dan misi Allah dalam rangka kemaslahatan semua orang dan pelaksanaan hukum seluruh umat manusia. Kekuasaan di ranah politik harus dijalankan, oleh karena itu kekuasaan dan politik adalah tugas dan amanah dari Allah yang berada dalam lingkup hukum untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.<sup>97</sup> Semua ini dapat tercapai dengan adanya dorongan serta bimbingan dari moral etik dalam melaksanakannya. Untuk mencapai hal tersebut Ibn Khaldun mengemukakan berbagai konsep, yaitu:

1. Konsep 'Ashabiyah

Kata '*ashabiyah* telah dikenal bangsa Arab jauh sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi, pengertian '*ashabiyah* memiliki makna negatif yaitu fanatisme rasial atau kesukuan dalam arti sempit, dan menyediakan segala cara untuk mencapai tujuannya.<sup>98</sup> Oleh karena itu, ashabiyah pada masa itu dianggap sebagai penyabot dominasi umat Islam awal karena melahirkan berbagai dinasti Islam. Namun dalam pendahuluan terjemahan Mukaddimah oleh Masturi Ilham dijelaskan

---

<sup>96</sup> Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibn Khaldun : Relevansinya denan Tata Kehidupan bernegara Era Modern*, (Jambi: Sultan Thah Press, 2007), 153.

<sup>97</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Ilham, (Jakarta: Pusatka Al-Kautsar, 2016), viii.

<sup>98</sup> Malik, *Pemikiran*, 180.



bahwa kata “*ashabiyah*” berasal dari kata “*ashaba*” (keluarga). Istilah tersebut awalnya dimaksudkan membantu dan memperkuat keluarga.<sup>99</sup> Kemudian, istilah tersebut berkaitan erat dengan kata “*ishabah*” dan “*ushbah*”, yang keduanya menunjukkan golongan atau kelompok.

‘*Ashabiyah*’ yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun tidak terbatas pada hubungan keluarga, tetapi dapat memiliki arti yang luas dalam bentuk hubungan yang terjalin secara efektif oleh seorang pemimpin dengan para pendukung dan masyarakatnya. Hubungan antara pemimpin dan komunitas menciptakan kebutuhan bersama untuk proses tersebut. Jika digabungkan bersama dalam skala besar, sejumlah besar kelompok akan saling menguntungkan dalam ranah negara.

‘*Ashabiyah*’ merupakan sebuah konsep besar yang mewarnai segenap pemikiran Ibn Khaldun. Di awal pernyataan tentang dinasti, kerajaan, khalifah, hierarki pemerintahan dan semua yang berhubungan dengan kekuasaan, dia menyatakan bahwa kemenangan selalu Berdiri di sisi dengan 'ashabiyah (persatuan) yang lebih kuat. Oleh karena itu, seorang penguasa membutuhkan sekelompok besar kesetiaan dan loyalitas untuk bersatu, mulai dari timnya menghadapi tantangan dalam dan luar negeri hingga otoritas dan kekuasaannya. Di antara berbagai “faksi Ashabian” atau kelompok solidaritas, kepala negara haruslah berasal dari kesatuan kelompok yang paling dominan.<sup>100</sup>

Ibn Khaldun memahami ‘ashabiyah’ sebagai ikatan yang mengikat dalam masyarakat. Hubungan ini membuat sekelompok 'asabiyah' dengan nasib yang

---

<sup>99</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 51.

<sup>100</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), 105.

sama. Jika salah satu anggota merasa sakit hati, maka seluruh komunitas asabiyah juga akan ikut tersakiti.<sup>101</sup>

Oleh karena itu, secara umum ‘ashabiyah merupakan ikatan emosional yang dapat mengikat dan mempersatukan hubungan interpersonal, sehingga memiliki tingkat solidaritas sosial yang tinggi dengan sesama. Misalnya dalam proses pemenuhan permintaan, ashabia bisa saling memperkuat kerjasama. Oleh karena itu, dengan adanya rasa kerjasama dan solidaritas maka segala kebutuhan dan kebutuhan akan terpenuhi. Karena dalam ‘ashabiyah, setiap orang memiliki visi yang sama untuk mencapai tujuannya dan merasa sangat dekat.

## 2. Sistem Dan Bentuk Negara

Mendirikan negara atau pemerintahan untuk mengatur urusan masyarakat adalah kewajiban agama terbesar. Hanya melalui negara atau pemerintah nilai-nilai agama keadilan, keamanan, ketertiban dan peradaban dapat dipertahankan.<sup>102</sup> Menurut Ibnu Khaldun, bentuk pemerintahan itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Kerajaan, adalah pemerintahan yang membawa orang ke tujuan dan aspirasi seseorang. Pemerintahan ini mirip dengan yang disebut pemerintahan otoriter, individualistis, otoriter, atau inkonstitusional.
- b) Republik, yaitu pemerintahan yang menjalankan kebijaksanaannya menurut rasio pemikir dan intelektual, dan karenanya membawa berbagai manfaat bagi rakyat dalam mewujudkan manfaat dunia.
- c) Khilafah, adalah pemerintahan yang membuat orang berpikir menurut jalan agama dalam mengejar semua kepentingannya. Inilah yang dipahami Ibn Khaldun sebagai pemerintahan Islam. Jika para intelektual menentukan asas-asas hukum, maka politik-politik yang dilahirkan rasional. Dan jika prinsip-prinsip tersebut bersumber dari hukum agama, maka orientasi politiknya adalah religius, bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 192.

<sup>102</sup> Jurdi, *Pemikiran politik*, 13.

<sup>103</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 83.

Menurut Ibn Khaldun (Ibn Khaldun), konsep Negara Islam tidak hanya berfokus pada penegakan hukum agama atau hal-hal yang berkaitan dengan akhirat saja. Tetapi juga pendekatan yang berfokus pada dunia dan akhirat secara seimbang. Dengan cara ini, pemerintahannya dapat benar-benar mencerminkan tujuan Islam untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

### 3. Pemimpin Dan Kedudukannya

Proses interaksi sosial antar manusia telah membawa kehidupan sosial yang lebih baik, sehingga seseorang harus mampu menyelesaikan semua permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial ini. Masyarakat membutuhkan orang yang berpengaruh yang dapat bertindak sebagai perantara dan isolator antar anggota masyarakat yang mengalami konflik atau masalah. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa :

“*Ashabiyah* adalah aset utama untuk melindungi dan mempertahankan diri, menuntut lawan dan segala yang dibutuhkan. Setiap komunitas sosial, manusia tentunya membutuhkan pengontrol dan mediator yang dapat menyelesaikan konflik antar kelompok lain dalam komunitas masing-masing. Oleh karena itu, pengontrol atau mediator harus dapat menggunakan *ashabiyah* untuk mengontrolnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa melakukan tugasnya secara normal.”<sup>104</sup>

Orang-orang yang sangat dibutuhkan oleh suatu komunitas harus memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggota komunitas lainnya, dan harus memiliki otoritas, kekuasaan, atau otoritas yang lebih tinggi atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, konflik antar masyarakat dan semua masalah dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Artinya menjadi orang yang bisa bertindak sebagai

---

<sup>104</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 218.

perantara, pemisah, dan pada saat yang sama hakim adalah kepala negara atau pemimpin.

Seorang pemimpin mengacu pada seseorang yang dapat menggunakan kemampuan, sikap dan idenya sendiri untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sejahtera bagi yang dipimpin, dan dapat mengoordinasikan setiap anggota untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, pemimpin memiliki potensi untuk menjaga keharmonisan dan kedisiplinan dalam masyarakatnya. Pemimpin harus memiliki keunggulan dan kekuasaan untuk bertindak. Memiliki kebijaksanaan untuk memutuskan kasus dan membuat keputusan- keputusan akhir yang harus dilaksanakan. Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun menyatakan bahwa:

“Seseorang yang memiliki ashabiyah yang kuat dan dihiasi dengan akhlak yang luhur, komitmen untuk melaksanakan hukum agama, maka ia siap mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin dan mampu menjalankan tugas yang mulia tersebut.”<sup>105</sup>

Menurut ajaran agama, pemimpin juga harus menjalankan tugas yang diinstruksikan oleh agama untuk memelihara amar ma'ruf nahi munkar dengan dukungan kekuasaan dan kewenangan negara atau pemerintah. Tujuan didirikannya negara adalah untuk melaksanakan sistem sosial yang baik, menjaga keadilan, mencegah segala macam kemalangan atau menyimpang dari agama atau norma umum, dan senantiasa menganjurkan agar manusia menggunakan kebajikan untuk mencapai ketertiban beragama. Oleh karena itu, dalam amar

---

<sup>105</sup> Ibid., 228.

ma'ruf nahi munkar, pemimpin juga diposisikan sebagai wakil Allah di dunia.

Dalam membahas kedudukan seorang pemimpin, Ibnu Khaldun menyatakan:

“Kekuasaan dari suatu kekhalifahan cenderung, memerintah masyarakat berdasarkan ajaran agama, baik dalam kepentingan-kepentingan akhirat maupun kepentingan-kepentingan dunia. Kekhalifahan ini pada hakikatnya merupakan pengganti atau wakil Allah dalam menjaga agama dan kehidupan dunia.”<sup>106</sup>

Jadi bagi Ibnu Khaldun khilafah merupakan sistem pemerintahan yang dikehendaki Allah SWT. Melalui sistem ini seorang pemimpin akan mengarahkan manusia-manusia lainnya pada kesejahteraan hidup. Seorang pemimpin tidak akan berlaku semena-mena sebab kepemimpinannya merupakan amanah dari Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Berbanding terbalik dengan sistem kerajaan (*ad-daulah*), sang khalifah juga dapat menyadari bahwa dirinya tak memiliki hak pribadi atas kekuasaannya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>106</sup> Ibid., 337.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil isi bahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan, maka dengan ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Khaldun mempunyai nama kecil Abdurrahman bin Khaldun Al Maghribi Al Maliki. Nama Khaldun diambil dari nama kakeknya yang kesembilan yaitu Khalid. Penamaan ini dikarenakan melalui kakeknya yang kesembilan ini lahir dan muncul tokoh-tokoh yang masyhur baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik, tidak terkecuali Ibn Khaldun sendiri. Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada abad delapan Hijriyah, ketika daerah itu sedang tidak stabil secara politik. Kekacauan terjadi dimana-mana sehingga membawa dampak lingkungan yang negatif bagi pertumbuhan masa kecil Ibnu Khaldun. Sejak kecil Ibnu Khaldun sudah sangat mencintai belajar dan ilmu pengetahuan, hal ini dipengaruhi oleh keluarga besarnya khususnya orang tuanya sendiri yang juga seorang pendidik. Minat politiknya tumbuh juga karena pengaruh ayahnya.

Ibnu Khaldun merupakan seorang yang fasih dalam ilmu Al-Qur'an, pendidikan masa kecilnya ia tempuh bersama orang tuanya juga guru-gurunya seperti Abdullah Muhammad bin Abdussalam yang mengajari Ibnu Khaldun kitab al-Muwatta' karya Imam Malik. Selain dia ada Abu 'Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili dalam bidang filsafat, logika, dan metafisika. Dalam politik Ibnu Khaldun secara khusus belajar kepada ayahnya dan kelarganya, karena memang secara turun temurun keluarga Ibnu Khaldun merupakan keluarga yang sangat erat

pekerjaannya berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Bakat kecerdasan dan kondisi sosial yang mendukung, menjadikan Ibnu Khaldun sebagai seorang pemikir yang kenamaan dan masyhur.

Buah dari renungan dan pemikirannya adalah bagian dari kefasihannya terhadap ilmu-ilmu agama dan kematangannya dalam ilmu logika dan filsafat. Bekal inilah yang mengantarkan Ibnu Khaldun mencapai jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan menjadi aktor dalam dunia politik praktis. Menurut penulis sebagai bukti kebesaran nama Ibnu Khaldun dalam dunia sejarah, sosiologi dan politik adalah karya-karyanya yang agung terutama kitab Mukaddimah.

2. Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun suatu hal yang bersifat kompetitif, hal ini dikarenakan kekuasaan terbentuk melalui suatu kontestasi perebutan atas satu kelompok pada kelompok yang lain untuk dapat menang dan menguasainya. Di dalam perebutan kekuasaan dengan tabiat manusia yang berpotensi terjadinya tindakan arogan, akan menimbulkan suatu perilaku yang buruk. Maka kemudian Ibnu Khaldun berpendapat bahwa substansial dari kekuasaan haruslah dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Di mana dalam kekuasaan harus mampu menghadirkan keamanan, kesejahteraan dan memberi perlindungan.

Dalam rumusan kekuasaan menurut Ibnu Khaldun, adalah menjadi tugas untuk dapat membantu yang lemah, merangkul semua pihak, menjunjung tinggi keadilan, menegakkan hukum, dan berprasangka baik terhadap pemeluk agama dan menghindari tindakan makar bagi setiap insan. Secara garis besar dalam pandangan Ibnu Khaldun kekuasaan adalah satu hal pencapaian yang ditujukan untuk kemanusiaan dan diiringi nilai-nilai moral Islam. Sedangkan Etika Politik

dalam pandangan Ibnu Khaldun merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan dalam suatu aktivitas politik yang dititikberatkan kepada moral etik Islam dalam segi pelaksanaannya.

Dalam kaitan etika moral, menurut Ibnu Khaldun ada tiga hal yang mendasari. *Pertama* Ashabiyyah, yaitu semangat kesolidaritasan yang tinggi, membesarkan rasa kerjasama dan bahu membahu untuk mencapai tujuan kekuasaan yang baik. *Kedua*, membentuk satu sistem negara yang egaliter, tidak terpaku pada satu dimensi agama dan akhirat saja. Tetapi harus berimbang dengan segala permasalahan dunia dan akhirat. *Ketiga*, memilih pemimpin yang memiliki sikap tegas, wibawa, bijak dan memiliki Ashabiyyah yang kuat serta akhlak yang terpuji dan mampu melaksanakan *'Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

#### B. **Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai "Pandangan Ibn Khaldun Tentang Kekuasaan dan Etika Politik Dalam Kitab Mukadimah", telah didapatkan beberapa kesimpulan seperti yang telah dijabarkan di atas. Maka selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bagian akhir dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Kepada seluruh mahasiswa secara umum baik yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya maupun di luar UIN Sunan Ampel Surabaya dan khususnya Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun maupun tentang kekuasaan dan etika



politik, harapannya agar terjadi suatu perkembangan dalam hal penelitian ataupun ilmu pengetahuan.

2. Bagi masyarakat umum secara luas, civitas akademika, peneliti dan cendekiawan lain agar lebih memahami perihal suatu konsep mengenai kekuasaan dan etika politik. Karena menurut penulis hal ini penting sebagai bekal dalam menjalankan hidup dalam ranah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terlebih kepada setiap insan yang mempunyai cita-cita untuk berkiprah dalam dunia politik dan pemerintahan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. Alfian. *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Ali, A. Mukti. *Ibn Chaldun dan Asal-Usul Sosiologi*. Yogyakarta: Yayasan Nida. 1970.
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Audah, Ali. *Dari Khazanah Dunia Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999.
- Baali, Fuad dan Ali Wardi. *Ibn Khaldun and Islamic Thought-style A social perspective*. Terj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha, (cet II; *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.
- Bing, Satanly. *Tujuan Menghalalkan Segala Cara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2008.
- Darsono. *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi*. Jakarta: Diadit Media. 2007.
- Dilthey, Wilhelm. *Pattern and Meaning in History: Thoughts on History and Society*. New York: Harper Torchbooks. 1962.
- Efriza. *Kekuasaan Politik: Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik*. Malang: Intrans Publishing. 2016.
- Enan, Muhammad Abdullah. *Ibn Khaldun: His Life And Work*. Delhi: New Taj Offset Press. 1979.

- Hermawan, Eman. *Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*. Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa. 2001.
- Huntington, Samuel P. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam Press. 2003.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Terj, Masturi Irham, Dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 2001.
- Machiavelli, Niccolo. *Sang Penguasa: Suarat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1991.
- Martin, Roderick. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993.
- Muhammad Iqbal, *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, alih bahasa Ali Audah dkk, Jakarta: Tintamas. 1966.
- Muhandi. *Kekuasaan dan Legitimasi Politik menurut Ibn Khaldun*. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Fakult as Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik. 2013.
- Mujahid, Hakim. *Etika Dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli Atas Etika Dan Kekuasaan Dalam Ranah Politik*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Fakult as Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2011.
- Mundiri, Mushadi dkk. *Membangun Negara Bermoral*. Semarang: Pustaka Rizki Putra Semarang. 2004.

- Nasoetion, Andi Hakim. *Pengantar ke Filsafat Sains*. Jakarta: Lintera Antar Nusa. 1999.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Rode, Carlton Dkk. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1988.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik iBarat: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno iSampai iModern*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2007.
- Sugono. Dendy Dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Sulaiman, Fathiyyah Hasan. *Pandangan Ibnu Khaldun Tentang Ilmu Dan Pendidikan*, alih bahasa HMD. Dahlan. Bandung: Diponrgoro.1987
- Suseno, Franz Magnis. *Dua Belas Tokoh iEtika iAbad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius. 2006.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. 2010.
- Toto Suharto. *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2003.
- Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Wafi, Ali Abdulwahid. *Ibn Khaldun: Riwayat dan Karyanya*, alih Bahasa *Ahmadie Thaha*, Jakarta:Grafitiepers. 1985.
- Zubair, Ahmad Charris. *Kuliah Etika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

<https://www.kompasiana.com/windaagustina/57d2b8bbf17e61464e70e275/penyalahgunaan-kekuasaan-era-reformasi>.

<https://nasional.okezone.com>Politik-Ijon-Akar-Munculnya-Pemimpin-Korup:OkezoneNasional>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A